

**PERKEMBANGAN EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Triwulan II - 2006

**Kantor Bank Indonesia
Batam**

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil

Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan

Visi Kantor Bank Indonesia Batam

Menjadi lembaga yang kredibel melalui kebijakan yang berhasil guna, peningkatan kompetensi dan kemitraan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan

Misi Kantor Bank Indonesia Batam

Merupakan bagian jaringan Bank Indonesia yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan fungsi dan kebijakan BI serta melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah

Kantor Bank Indonesia Batam
Jl. Engku Putri – Batam Center
B A T A M
Telp. 0778 – 462280
Fax. 0778 – 462254

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan kuasaNya maka Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II-2006 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan kajian rutin triwulanan yang disusun oleh Kantor Bank Indonesia Batam, guna memenuhi kebutuhan intern Bank Indonesia serta kebutuhan ekstern mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan indikator perekonomian daerah antara lain di bidang Makro Ekonomi, Moneter, Perbankan dan Keuangan Daerah. Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode triwulan I-2006 ini sebagai kajian berkala yang meliputi data-data dan kajian wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang resmi terbentuk sejak 1 Juli 2004.

Data dan informasi yang terdapat pada laporan ini diperoleh dari beberapa pihak, diantaranya Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Otorita Batam, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Kepri, dinas-dinas terkait termasuk dari Bank Indonesia

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap agar hubungan baik ini tetap terjaga dan dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Disamping itu kami juga mengharapkan masukan, saran serta penyediaan data yang lebih lengkap dari semua pihak agar kualitas dari hasil laporan ini lebih baik lagi untuk masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya serta memberikan kemudahan kepada kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja untuk pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Batam, Agustus 2006

ttd

Tindomora Siregar
Pemimpin

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
1.1 Kondisi Umum.....	7
1.2 Perkembangan Penduduk	10
1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	11
1.4 Perkembangan Tenaga Kerja	13
1.5 Perkembangan Pariwisata	14
1.6 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)	15
1.7 Perkembangan Pedagang Valuta Asing (PVA)	16
1.8 Pendapatan Perkapita Provinsi Kepulauan Riau ...	17
1.9 Sektor Ekonomi Dominan	17
1.9.1 Sisi Penawaran / Produksi ...	19
1.9.1.1 Komponen Industri Pengolahan	19
1.9.1.2 Komponen Pertambangan	20
1.9.1.3 Komponen Perdagangan ..	21
1.9.1.4 Komponen Keuangan ..	21
1.9.1.5 Komponen Pertanian ..	22
1.9.2 Sisi Permintaan / Penggunaan ..	24
1.10 Perkembangan Ekspor & Impor di Wilayah Kerja Batam	24
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI	
2.1 Kondisi Umum.....	26
2.2 Laju Inflasi / Deflasi Bulanan (m-t-m)	28
2.2.1 Laju Inflasi/Deflasi Bulan April 2006	28
2.2.2 Laju Inflasi/Deflasi Bulan Mei 2006	29
2.2.3 Laju Inflasi/Deflasi Bulan Juni 2006 ..	30

2.3 Laju Inflasi/Deflasi Triwulanan (q-t-q) ..	32
2.4 Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) ..	34

BAB III. PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM

PEMBAYARAN

3.1 Kondisi Umum.....	35
3.2 Moneter	35
3.3 Perbankan	37
3.3.1 Perkembangan Total Asset Bank Umum.....	40
3.3.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum	42
3.3.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum	44
3.3.4 Perkembangan BPR	48
3.3.5 Perkembangan Kredit UMKM	51
3.4 Perkembangan Sistem Pembayaran	54
3.4.1 Pengedaran Uang Kartal	54
3.4.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar ..	54
3.5 Lalu Lintas Pembayaran Giral ..	55
3.5.1 Kliring Lokal ..	55
3.5.2 Transaksi BI-RTGS ..	56
3.5.3 Uang Palsu	56

BAB IV. KEUANGAN DAERAH PERIODE TAHUN 2006

4.1 Kondisi Umum ..	57
4.2 APBD Kota Batam ..	59
4.3 Penerimaan Kantor Pendapatan Daerah Kota Batam	60
4.4 Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Kota Batam	60

BAB V. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

5.1 Prospek Ekonomi Makro	62
5.2 Prospek Inflasi	63
5.3 Prospek Perbankan	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota se-Provinsi Kepri Juni 2006 ..	10
Tabel 1.2 IPM Kab/Kota di Provinsi Kepri thn 2004.....	12
Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Kota Batam.....	14
Tabel 1.4 Perkembangan Jml Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam	14
Tabel 1.5 Perkembangan Jml Wisatawan Mancanegara Mnrt Kebangsaan	15
Tabel 1.6 Perbandingan Jml Wisman Menurut Pintu Masuk di Provinsi Kepri	15
Tabel 1.7 Perkembangan Rencana Investasi Asing di Kota Batam.....	16
Tabel 1.8 Pendapatan Perkapita Provinsi Kepri Tw.II-2006	17
Tabel 1.9 Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Pembentukan PDRB Provinsi Kepri	18
Tabel 2.1 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Batam thn 2006	32
Tabel 3.1 Perkembangan Uang Giral dan Kuasi di Wilker KBI Batam	36
Tabel 3.2 Perkembangan Suku Bunga.....	36
Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Perbankan di Wilker KBI Batam.....	38
Tabel 3.4 Perkembangan Total Asset Perbankan di Wilker KBI Batam.....	41
Tabel 3.5 Penghimpunan Dana Bank Umum di wilker KBI Batam.....	43
Tabel 3.6 Perkembangan Outstanding Kredit Bank Umum di wilker KBI Batam.....	44
Tabel 3.7 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum	46
Tabel 3.8 Perkembangan Kolektibilitas Kredit Bank Umum di Wilker KBI	47
Tabel 3.9 Perkembangan Kinerja BPR di Wilker KBI Batam	48
Tabel 3.10 Perkembangan Kolektibilitas Kredit BPR di Wilker KBI Batam	49
Tabel 3.11 Perkembangan Kredit BPR Mnrt Jenis Penggunaan	50
Tabel 3.12 Perkembangan Sektor Ekonomi yang Memproleh Pembiayaan BPR	51
Tabel 3.13 Perkembangan Kliring Lokal di Wilker KBI Batam	55
Tabel 3.14 Perkembangan RTGS di Wilker KBI Batam	56
Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Prov. Kepri	58
Tabel 4.2 Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Provinsi Kepri	58
Tabel 4.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB di Kota Btm	60
Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Neto Melalui KPP Batam	61

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Perkembangan PDRB (Rp Juta) dan LPE triwulanan 7
Grafik 1.2	Perkemb. Laju Pertumb. Sektor Industri Provinsi Kepri 19
Grafik 2.1	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan 28
Grafik 2.2	Perkemb. Inflasi Bulanan Kel. Makanan Jadi, Minuman, Rokok..... 28
Grafik 2.3	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Sandang 29
Grafik 2.4	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan 29
Grafik 2.5	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Sandang 30
Grafik 2.6	Perkemb. Inflasi Bulanan Kel. Pendidikan, Rekreasi & Olahraga 30
Grafik 2.7	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan 31
Grafik 2.8	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Sandang 31
Grafik 2.9	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga.. 31
Grafik 2.10	Perkembangan Harga Komoditi di Kota Batam 32
Grafik 3.1	Grafik Perkemb. Total Asset Bank Umum di Wilker KBI Batam 41
Grafik 3.2	Perkemb. Total DPK Bank Umum di Wilker KBI Btm tw.II-2006 44
Grafik 3.3	Perkemb. Outstanding Kredit Bank Umum di Wilker KBI Batam 45
Grafik 3.5	Perkemb. Asset & DPK BPR di Wilker KBI Batam 49
Grafik 3.6	Perkemb. Kredit Kepada UMKM di Wilker KBI Batam 52
Grafik 3.7	Perkemb. Inflow/Outflow di KBI Batam 54
Grafik 3.8	Perkemb. PTTB 55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1 PDRB Provinsi Kepri atas dasar harga berlaku.....	64
Tabel 2 PDRB Provinsi Kepri atas dasar harga konstan 2000	65
Tabel 3 Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Kepri	66
Tabel 4 Perkembangan Inflasi Kota Batam, Pekanbaru dan Nasional	67
Tabel 5 Data bank umum wilayah kerja Bank Indonesia Batam	68
Tabel 6 Data bank umum wilayah Kepulauan Riau	69
Tabel 7 Data Bank Umum Wilayah Kota Batam	70
Tabel 8 Data Pengaliran Kas Masuk/Keluar dan Kegiatan PTTB KBI Batam	71
Tabel 9 Perputaran Kliring Batam, Tj. Pinang & Tj. Balai Karimun	72

RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN II - 2006

*Kondisi Perekonomian
Provinsi Kepulauan Riau
pada triwulan II-2006
cukup stabil*

Pada pertengahan tahun 2006, kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau cukup stabil, yang tercermin antara lain pada jumlah PDRB Provinsi Kepulauan Riau yang terus meningkat, laju inflasi yang cukup stabil, perkembangan indikator perbankan, serta perkembangan investasi yang terus membaik.

*Secara triwulanan (qtq),
PDRB Provinsi Kepri pada
triwulan II-2006 meningkat
sebesar 1,98% terhadap
triwulan I-2006*

Jumlah PDRB Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan peningkatan. Secara triwulanan, tingkat PDRB Provinsi Kepri atas dasar harga konstan tahun 2000 pada triwulan II-2006 sebesar Rp.8,07 triliun dan meningkat sebesar 1,98% (qtq) terhadap triwulan I-2006 yang mencapai Rp.7,91 triliun. Sementara itu, berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Provinsi Kepri pada triwulan II-2006 sebesar Rp.11,21 triliun dan meningkat sebesar 3,03% (qtq) terhadap triwulan I-2006 yang mencapai Rp.10,88 triliun. Secara tahunan, tingkat PDRB Provinsi Kepri atas dasar harga konstan tahun 2000 pada triwulan II-2006 meningkat sebesar 7,73% (yoy) dimana pada triwulan II-2005 nilai PDRB Provinsi Kepri sebesar Rp.7,49 triliun, dan atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 14,34% (yoy) dimana pada triwulan II-2005 nilai PDRB Provinsi Kepri sebesar Rp.9,80 triliun. Berdasarkan perkembangan data PDRB Provinsi Kepri selama beberapa tahun terakhir, maka diperkirakan kondisi perekonomian daerah yang tercermin pada PDRB Provinsi Kepri triwulan II-2006 akan mengalami peningkatan.

*Sektor Industri memberikan
sumbangan terbesar
terhadap pembentukan
PDRB, diikuti sektor
pertambangan, sektor
perdagangan, dan sektor
keuangan*

Sektor industri masih memberikan sumbangan pertumbuhan terbesar pada pembentukan PDRB pada triwulan laporan, yang diikuti oleh sektor pertambangan, sektor perdagangan, dan sektor keuangan. Sebagaimana diketahui, selama 3 (tiga) tahun terakhir ini secara nasional sektor industri mengalami guncangan yang cukup berat akibat dari demonstrasi yang dilakukan oleh buruh terkait dengan tuntutan kenaikan tingkat upah buruh serta revisi UU ketenagakerjaan. Hal ini cukup berpengaruh terhadap sektor industri di Kota Batam. Pada awal tahun 2006, tercatat 16 PMA yang keluar dari Batam sehingga hanya terdapat 80 perusahaan dari 96 perusahaan yang ada pada tahun 2002 serta 3 (tiga) perusahaan dalam negeri (PMDN).

Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam mengalami peningkatan.

Sementara itu, secara finansial menjelang awal tahun 2006, investor asing yang menanamkan modalnya di Kota Batam mengalami peningkatan, dimana pada triwulan I-2006 terdapat 21 PMA sedangkan pada triwulan I-2005 sebanyak 11 PMA. Letak Kota Batam yang strategis memberikan karakteristik tersendiri bagi daerah ini sehingga diperlukan kebijakan khusus yang akan mendukung perkembangan perekonomian daerah. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan fasilitas khusus untuk Pulau Batam, Bintan, dan Karimun yang disebut dengan *Bonded Zone Plus* (BZP) sejak Juli 2005 yang bertujuan untuk memberikan kemudahan di bidang kepabeanan, fiskal dan perdagangan.

Pemerintah Pusat mengembangkan wacana penerapan sistem SEZ di Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Bintan

Disamping itu, saat ini wacana Pemerintah Pusat dalam pengembangan *Special Economic Zone* (SEZ) dimana Batam merupakan salah satu daerah yang akan dijadikan sebagai kawasan SEZ telah mendekati *final*. SEZ merupakan suatu kerangka kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dimana penerapan SEZ antara lain untuk Pulau Bintan dan Pulau Batam, namun demikian berkembang pula bahwa Tanjung Balai Karimun akan termasuk dalam kerangka SEZ selain kedua daerah tersebut. Bentuk kerangka kerjasama tersebut telah dituangkan dalam kerjasama antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani oleh Menko Perekonomian - Boediono dan Menteri Perdagangan & Perindustrian Singapura – Lim Hing Kiang yang berlangsung di Nongsa Point Marina pada tanggal 25 Juni 2006. dimana pada tanggal 25 Juni 2006 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura – Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) *Special Economic Zone* (SEZ) di wilayah Batam, Bintan dan Karimun. Delegasi Indonesia yang turut hadir adalah Menlu – Hassan Wirajuda, Menko Polhukam – Widodo AS, Menperin – Fahmi Idris, Menteri Perdagangan – Marie Pangestu, Menhub – Hatta Radjasa, Ketua BKPM – M. Luthfi, Menakertrans – Erman Suparno, Menteri Sekretaris Negara – Yusril Ihza Mahendra. Sementara PM Singapura – Lee Hsien Loong didampingi oleh Menteri Senior Goh Chok Tong dan Menlu – George Yeo. Adapun kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan kerjasama ekonomi dalam kawasan ekonomi khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun dan akan dievaluasi pada empat bulan kedepan.

Persetujuan SEZ ditandatangani oleh Menko Perekonomian RI – Boediono dan Menteri Perdagangan & Perindustrian Singapura – Lim Hing Kiang

Adapun pemberlakuan SEZ di wilayah BBK (Batam, Bintan dan Karimun) yang bertujuan untuk meningkatkan investasi pada suatu daerah memberikan beberapa keunggulan, diantaranya adalah meningkatkan ekspor serta memperluas lapangan kerja. Disamping itu, pemberlakuan SEZ yang menawarkan kemudahan dalam perdagangan dan produksi untuk ekspor, maka diharapkan akan dapat menarik investasi,

Tujuan dari pemberlakuan SEZ adalah untuk meningkatkan investasi pada suatu daerah yang diharapkan akan meningkatkan ekspor serta memperluas lapangan kerja

perdagangan valuta asing, serta meningkatkan teknologi dan infrastruktur. Dari beberapa keuntungan pemberlakuan SEZ pada suatu daerah, terdapat beberapa *issue* maupun kritik, antara lain adalah SEZ hanya akan menarik investasi dan akan menimbulkan distorsi dibidang insentif dibandingkan dengan membentuk kondisi yang saling menguntungkan, insentif yang diberikan menciptakan beban bagi pembayar pajak dan merusak lingkungan serta merusak standar buruh. Selain itu dipercayai juga bahwa biaya-biaya untuk memelihara zona khusus tersebut tidak menguntungkan perekonomian dan kesejahteraan.

Pada triwulan II-2006, Kota Batam mengalami deflasi sebesar (0,58%)

Sementara itu, pada triwulan II-2006 (data yang tersedia bulan April & Juni 2006), Kota Batam mengalami deflasi sebesar (0,58%) dimana pada bulan April terjadi deflasi sebesar (0,56%) dan bulan Mei terjadi deflasi sebesar (0,23%). Bila dibandingkan dengan laju inflasi Kota Batam pada triwulan I-2006 yang tercatat sebesar 0,66% maka terdapat kecenderungan penurunan harga komoditi selama 2 (dua) bulan terakhir. Sedangkan pada triwulan I-2005 sebesar 2,65%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perlambatan pergerakan harga-harga komoditi di Kota Batam. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap valuta asing (SGD) selama triwulan II-2006 stabil dan cenderung menguat. Posisi Kota Batam yang cukup strategis karena berada dekat dengan negara tetangga diperkirakan turut mempengaruhi pergerakan harga komoditi di Kota Batam.

Indikator perbankan menunjukkan perkembangan yang cukup baik

Dari sisi perbankan, indikator pertumbuhan sektor perbankan pada triwulan II-2006 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Total asset bank umum sebesar Rp.12.173.496 juta meningkat 15,28% dari triwulan I-2006. Sementara itu, total Dana Pihak Ketiga (DPK) dan total penyaluran kredit juga meningkat masing-masing sebesar 19,85% dan 6% dimana tingkat LDR mencapai 56,69% dan NPL nett sebesar 4,26%. Jumlah bank umum yang terdapat di Provinsi Kepri sampai dengan bulan Juni 2006 sebanyak 24 bank umum yang terdiri dari 38 kantor cabang yang tersebar di wilker KBI Batam, 61 KCP, 17 unit, 31 kantor kas, 3 payment point, 309 ATM serta 10 BPR,. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan memandang potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepri merupakan kesempatan untuk membuka kegiatan usahanya di daerah ini. Disamping itu perekonomian yang didominasi oleh sektor industri menyebabkan tingkat perputaran kegiatan ekonomi yang cukup tinggi dan membutuhkan peranan perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Provinsi Kepri memiliki potensi yang cukup besar, diantaranya potensi kelautan

Pulau Batam yang termasuk di Provinsi Kepri merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi yang cukup besar. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Kadin Kota Batam – Nada Faza Soraya yang menyebutkan bahwa minimal terdapat 7 (tujuh) sumber utama potensi ekonomi yang potensial dikembangkan di Kota Batam, diantaranya adalah transportasi laut (berupa angkutan dalam negeri, angkutan umum ataupun angkutan luar negeri), sektor perikanan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, industri kapal, bangunan laut dan pantai, serta benda-benda berharga muatan kapal tenggelam, serta sektor pariwisata bahari.

Kota Tanjung Pinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepri saat ini sedang menyempurnakan kelengkapan infrastruktur serta sarana umum

Disamping Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki Kota Tanjung Pinang yang juga merupakan ibukota Provinsi. Daerah tersebut saat ini sedang menyempurnakan kelengkapan infrastruktur serta sarana umum agar kegiatan pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan baik. Oleh karena itu pada tahun 2006, Pemerintah Daerah Provinsi Kepri mengalokasikan anggaran daerahnya pada sektor infrastruktur terutama pada daerah-daerah yang masih terisolir.

Pemprov melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, diantaranya pembangunan infrastruktur, perhubungan udara

Anggaran daerah yang dialokasikan tersebut hampir mencapai Rp.500 miliar. Adapun pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah sektor perhubungan laut, dimana Pemprov akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan frekuensi pelayaran antar pulau. Dengan demikian diharapkan arus perdagangan dan perekonomian antar pulau bisa meningkat. Disamping itu Pemprov juga mendukung usaha-usaha swasta yang bergerak di bidang perhubungan udara. Untuk itu Pemprov akan melakukan pembangunan dan perluasan bandara-bandara yang ada di Provinsi Kepri seperti Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Kijang Tanjung Pinang, Bandara Dabo di Lingga dan Bandara Ranai di Natuna. Dengan terciptanya kelancaran perhubungan laut dan udara diharapkan dapat mempersempit kesenjangan jarak antar daerah.

Berkaitan dengan upaya pembangunan perekonomian di Provinsi Kepri, Presiden RI – Susilo Bambang Yudhoyono pada saat kunjungannya ke Batam pada tanggal 2 – 3 Februari 2006 menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) program yang perlu diprioritaskan untuk segera diselesaikan, yaitu:

1. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, peningkatan pajak bagi negara, dan peningkatan ekspor.
2. Mengoptimalkan potensi-potensi di pulau lain di luar Batam untuk dikembangkan sebagai kawasan argo industri, industri kecil ataupun kawasan wisata.

3. Menciptakan manusia yang berkualitas, cerdas dan terampil bisa berdaya saing.

Posisi Provinsi Kepri yang berdekatan dengan negara tetangga, antara lain Malaysia dan Singapura turut mempengaruhi penggunaan mata uang asing dalam transaksi ekonomi. Cukup tingginya permintaan penggunaan valuta asing seperti Malaysian Ringgit, Singapore Dollar, dan USD turut mempengaruhi jumlah Pedagang Valuta Asing (PVA – *Money Changer*) yang beroperasi di wilker KBI Batam, yaitu sebanyak 91 PVA yang tersebar di Kota Batam sebanyak 65 PVA (71,43%), Kota Tanjung Pinang sebanyak 12 PVA (13,33%), Kabupaten Tanjung Balai Karimun sebanyak 9 PVA (9,89%), Tanjung Uban sebanyak 3 PVA (3,3%), serta Tanjung Batu sebanyak 2 PVA (2,2%). Apabila dibandingkan dengan jumlah PVA yang terdapat di wilker Kantor Bank Indonesia (KBI) yang lainnya, maka wilker KBI Batam menempati posisi ke-3 terbesar setelah DKI Jakarta dan Denpasar. Pedagang Valuta Asing sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki peranan yang cukup strategis, khususnya dalam perkembangan pasar valuta asing domestik maka Bank Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan terhadap pedagang valuta asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha, pengawasan dan pembinaan yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 6/1/PBI/2004 tentang Pedagang Valuta Asing tanggal 6 Januari 2004.

Batam, Juli 2006

RINGKASAN EKSEKUTIF
INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER TRIWULANAN
WILAYAH KERJA KANTOR BANK INDONESIA BATAM

INDIKATOR	2003				2004				2005				2006	
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II
MAKRO														
Laju Inflasi (q-t-q)	2.07	-0.95	0.75	2.35	0.47	1.10	0.70	1.89	2.65	0.39	1.52	9.6	0.66	-0.39
IHK Bahan Makanan	-1.53	-5.32	-1.03	7.35	-0.16	-0.34	0.83	3.18	3.78	0.05	2.21	10.3	1.76	-2.16
IHK Makanan Jadi	6.95	-0.27	1.09	0.79	0.14	0.45	0.89	4.99	1.52	1.12	0.69	5.98	0.93	0.25
IHK Perumahan	3.12	1.70	0.46	1.05	0.27	1.07	0.52	0.32	0.70	0.24	1.46	4.38	0.14	0.24
IHK Sandang	0.26	-1.15	1.45	3.36	-0.01	0.43	0.54	1.25	1.00	1.09	2.65	1.76	0.22	0.35
IHK Kesehatan	0.62	5.68	1.82	-0.49	-0.01	1.84	-0.12	0.07	0.67	1.17	1.3	1.46	0.56	0.44
IHK Pendidikan	0.28	-0.33	7.91	0.15	0.05	0.65	1.11	0.34	0.07	0.14	6.98	0.63	-0.24	0.36
IHK Transport	2.19	-0.14	0.00	0.00	0.19	4.44	0.69	0.04	7.20	0.03	0.03	23.06	0.10	0.11
Pertumbuhan PDRB (q-t-q)	2.14	1.41	2.06	1.99	1.86	1.11	0.73	0.36	*	2.22	2.41	1.71	1.42	1.98
Ekspor (Ribuan USD)	1,110,161	1,000,002	1,229,359	1,248,603	1,077,826	925,490	1,259,378	762,606	940,773	1,618,970	1,282,820	1,307,957	1,331,007	2,262,712
Impor (Ribuan USD)	465,893	35,799	16,862	34,098	99,729	125,456	10,980	212,948	91,954	260,646	332,178	354,964	228,037	230,317
PERBANKAN														
Deposito (miliar Rp)	1,452.45	1,329.15	1,438.21	1,439.15	1,328.99	1,270.24	1,408.87	1,446.24	1,616.15	1,805.53	2,070.99	2,169.29	2,302.86	2,725.13
Giro (miliar Rp)	1,996.06	2,181.32	2,328.63	2,404.28	2,397.72	2,745.92	2,860.73	2,839.40	3,106.07	3,183.28	3,262.74	3,524.56	3,429.73	4,435.88
Tabungan (miliar Rp)	1,959.85	2,041.54	2,190.14	2,542.28	2,536.22	2,742.02	2,900.97	3,016.97	3,084.28	3,132.15	3,040.04	3,013.30	2,819.91	3,089.24
DPK (miliar Rp)	5,408.36	5,552.01	5,956.98	6,395.71	6,262.93	6,758.18	7,170.59	7,302.61	7,806.50	8,120.96	8,373.78	8,707.15	8,552.50	10,250.25
Total Asset (miliar Rp)	6,165.65	6,330.12	6,667.26	7,310.10	7,152.30	7,787.04	8,263.39	8,440.49	9,316.23	9,715.10	10,213.91	10,666.45	10,559.53	12,513.64
Kredit Umum (miliar Rp)	2,159.81	2,450.28	2,714.74	2,302.09	2,413.38	3,564.40	3,962.75	4,141.66	4,761.13	5,104.37	5,685.47	5,877.40	5,771.56	6,283.82
KUK (miliar Rp)	828.15	880.12	781.42	744.99	765.80	776.10	780.06	778.51	794.30	787.40	757.98	1394.67	733.61	745.69
Suku Bunga Kredit (rata2 tertimbang)	17.99%	17.48%	16.78%	15.45%	15.13%	15.39%	15.60%	15.26%	16.69%	21.61%	13.84%	16.31%	15.58%	16.67%
Suku Bunga Dep 3 bln (rata2 tertmbng)	11.51%	10.52%	9.10%	8.13%	7.23%	6.46%	6.37%	6.26%	6.50%	6.78%	6.94%	9.89%	10.20%	10.09%
LDR (%)	39.93%	44.13%	45.57%	47.72%	50.76%	52.74%	55.26%	56.71%	60.99%	62.85%	67.90%	67.50%	67.48%	59.69%
NIM (%)	-0.16%	0.05%	1.00%	2.45%	1.42%	2.83%	3.99%	4.84%	1.47%	2.76%	3.77%	4.83%	1.21%	2.31%
NPL (%)	3.03%	5.09%	3.42%	2.37%	3.68%	4.10%	3.94%	3.34%	2.72%	4.12%	5.15%	6.01%	6.17%	5.87%
SISTEM PEMBAYARAN														
Inflow (miliar Rp)	480.66	348.81	361.07	434.73	482.27	411.59	484.41	538.76	640.23	544.74	499.38	789.7	804.04	416.46
Outflow (miliar Rp)	475.31	546.27	639.65	1,033.53	581.28	891.15	838.26	1,339.74	926.99	999.53	1,013.85	1,234.96	933.75	854.39
PTTB (miliar Rp)	316.26	180.58	177.3	177.04	260.29	312.12	413.45	308.78	409.23	252.3	133.24	103.82	204.92	131.42
Nominal Uang Palsu	400,000	320,000	1,680,000	560,000	775,000	1,170,000	830,000	2,390,000	3,400,000	1,810,000	985,000	1,305,000	2,060,000	1,220,000
Jumlah uang palsu (lembar)	9	7	34	11	13	15	12	43	62	32	14	18	25	28
Volume Kliring (lembar)	124,504	131,251	138,377	135,819	136,461	140,276	145,620	145,176	144,005	154,879	157,535	150,400	146,241	154,662
Nominal Kliring (miliar Rp)	1,783.88	1,629,237	1,843,390	1,908,215	1,888,256	1,914,133	2,062,812	2,151,372	2,054,496	2,208,473	2,371,965	2,258,818	2,168.74	2,734.43
KEUANGAN DAERAH														
Pendapatan Asli Daerah (miliar Rp)	14.59	13.52	14.01	8.29	11.43	12.62	13.85	17.82	14.46	29.03	0	0	18.81	43
Dana Alokasi Umum (miliar Rp)	27.00	16.11	21.74	56.59	26.05	26.05	26.05	17.37	20.97	12.76	0	0	2,028.55	58,994.97
Dana Alokasi Khusus (miliar Rp)	0	0	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,300.75	37,300.75

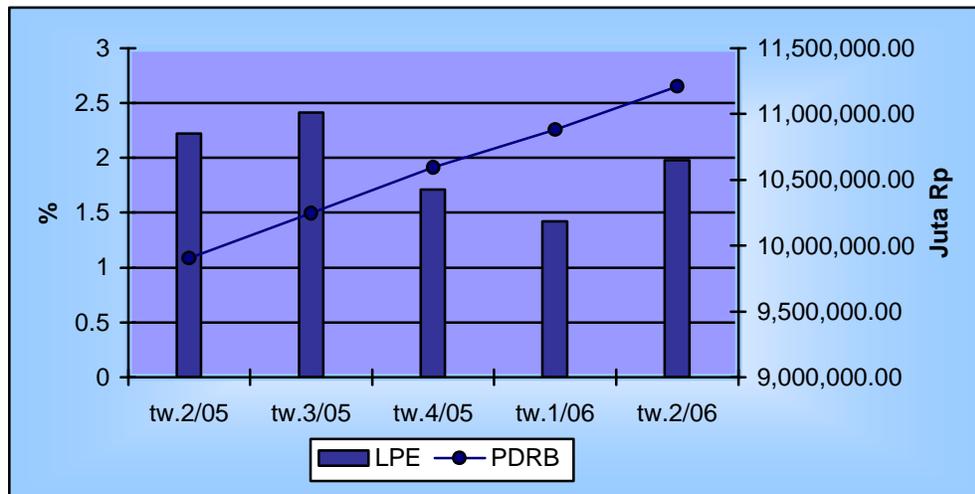
Bab 1

Perkembangan Ekonomi Makro Provinsi Kepulauan Riau

1.1 KONDISI UMUM

Sampai dengan Semester I-2006, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan yang cukup stabil. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga konstan tahun 2000¹ pada tahun 2004 sebesar 6,47%, tahun 2005 sebesar 6,52%. Sementara itu pada triwulan I-2006² sebesar 1,42% dan triwulan II-2006³ sebesar 1,98%. Sementara itu, perkembangan rencana Penanaman Modal Asing (PMA) yang disetujui oleh Otorita Batam terus meningkat yaitu sebanyak 31 proyek baru dengan nilai investasi sebesar US\$.33,8 juta dan 13 proyek perluasan usaha senilai US\$.134,3 juta. Dari sisi pariwisata, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia melalui Batam mengalami kenaikan sebesar 0,17% sedangkan melalui Tanjung Pinang mengalami penurunan sebesar 1,94%.

Grafik 1.1
Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku(Rp Juta) dan LPE Triwulanan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) – Provinsi Kepulauan Riau

Faktor utama pendorong pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepri adalah sektor bangunan yang mengalami pertumbuhan signifikan. Kondisi ini disebabkan kebutuhan

¹ Tahun dasar disesuaikan, dimana pada tahun 2005 menggunakan tahun dasar 1993

² Periode Januari s/d Maret

³ Periode April s/d Juni

perumahan regional terutama di Kota Batam hingga saat ini tetap tinggi terutama kebutuhan rumah sederhana sehat. Sebagaimana disebutkan oleh Ketua REI Batam (Eddy Husi) bahwa setiap tahun kebutuhan perumahan dan ruko di Batam mencapai 10.000-12.000 unit.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi nasional pada tw.II-2006 diperkirakan sebesar 4,6%-5,1% yang utamanya ditopang oleh peningkatan ekspor yang cukup besar. Melambatnya pertumbuhan ini terutama karena rendahnya permintaan domestik yang dipengaruhi oleh belum meningkatnya daya beli masyarakat sebagaimana tercermin pada upah riil yang masih menurun, belum membaiknya iklim investasi dan dampak multiplier pengeluaran pemerintah yang masih relatif rendah.

Dari sisi regional, perekonomian Provinsi Kepri hingga tw.II-2006 tumbuh cukup stabil meskipun masih mengalami tekanan yang disebabkan masih relatif tingginya harga barang dan jasa sebagai dampak kenaikan harga BBM di akhir tahun. Kenaikan harga tersebut mendorong kenaikan biaya produksi sehingga memperlambat kinerja sektor industri. Padahal, Batam yang berada dekat dengan Singapura dan Johor merupakan wilayah segi tiga pertumbuhan ekonomi yang strategis karena ketiga wilayah tersebut dekat dengan Selat Malaka dan Selat Singapura yang menjadi jalur perdagangan internasional.

Di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada tw.II-2006 terutama didorong oleh sektor bangunan. Maraknya pembangunan sektor properti dapat dilihat dari alokasi lahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), dimana dari luas Pulau Batam sebesar 41.500 hektar, sampai akhir tahun 2005 pihak Otorita Batam telah mengalokasikan lahan untuk sektor perumahan sebesar 9.646 hektar atau 39,85%⁴. Sementara distribusi terbesar pada perekonomian Provinsi Kepri (tw.II-2006) berasal dari sektor industri (59,38%). Letak Kota Batam yang strategis menyebabkan sektor industri dan sektor perdagangan menjadi sektor andalan

Di sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi sektor yang menopang perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tw.I-2006. Pertumbuhan sektor ini menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah daerah Provinsi Kepri yang mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) mengalami peningkatan. Provinsi Kepri yang baru berdiri tahun 2004 saat ini masih melakukan pembenahan di segala bidang, baik dari sisi internal pemerintah maupun infrastruktur. Hal ini mempengaruhi pengeluaran konsumsi pemerintah daerah untuk belanja pegawai serta pembiayaan lainnya.

⁴ Uraian lebih lengkap lihat di boks - I

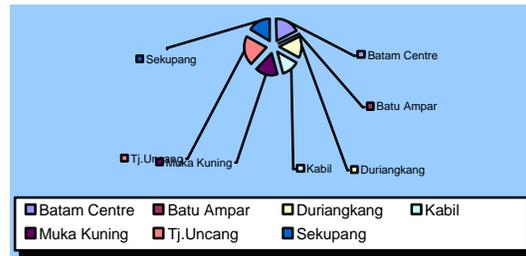
BOKS – I

Survey Indeks Harga Properti Residensial di Kota Batam Tw.II – 2006⁵

Ruang lingkup Survey Indeks Harga Properti Residensial (SIHPR) meliputi harga jual rumah, harga jual tanah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dijual oleh perusahaan pengembang perumahan (*primary market*) yang melakukan transaksi penjualan. Informasi yang diperoleh dari hasil survey digunakan untuk melihat perkembangan harga dan kuantitas properti residensial, baik yang terjadi pada triwulan berjalan maupun perkiraan harganya untuk triwulan mendatang. Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan membandingkan harga dan kuantitas properti triwulan berjalan dengan periode sebelumnya yang disajikan dalam bentuk indeks harga properti residensial. Perkembangan indeks harga properti residensial ini juga digunakan sebagai salah satu komponen penghitung dalam penelitian inflasi harga aset.

Lokasi responden untuk SHPR berdasarkan pada Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Otorita Batam yang meliputi : Batam Centre, Batu Ampar, Sekupang, Muka Kuning, Tanjung Uncang, Nongsa, Kabil dan Duriangkang dimana jumlah sampel sebanyak 53 proyek. Sementara itu, realisasi luas lahan proyek yang telah dikembangkan berdasarkan SWP Otorita Batam sampai dengan tw.II – 2006 adalah :

NO	SWP	% REALISASI LAHAN
1	Batam Centre	82,64%
2	Batu Ampar	-
3	Duriangkang	71,11%
	Kabil	58,75%
5	Mukakuning	75,33%
6	TJ. Uncang	100,00%
7	Sekupang	77,00%
Rata - Rata		77,47%



Sumber : Laporan SHPR – Data Diolah, 2006

Berdasarkan hasil survei, terlihat bahwa tipe rumah yang dijual oleh pengembang masih didominasi oleh kelas kecil (40,94%), kelas sedang (32,28%) dan kelas besar (26,77%)⁶, sedangkan untuk rata-rata harga rumah berdasarkan klasifikasinya terlihat bahwa terdapat peningkatan harga rata-rata terhadap tw.I-2006 pada rumah besar (naik dari Rp.528.803.148,15 menjadi Rp.535.351.621,88), rumah sedang (naik dari Rp.202.099.510,76 menjadi Rp.202.249.897,50), namun pada rumah kecil terdapat penurunan yaitu dari Rp.67.927.080,20 menjadi Rp.66.624.303,90).

Hasil survei IHPR tw.II-2006 diketahui bahwa indeks tw.II-2006 sebesar 1,72 yang relatif lebih tinggi dibandingkan tw.I-2006 yaitu 0,71. Kenaikan IHPR yang cukup tinggi terjadi pada tipe rumah besar (1,24%) sedangkan rumah kecil menurun sebesar 1,92% dan untuk rumah sedang cenderung stabil karena hanya mengalami kenaikan sebesar 0,07%.

Terkait dengan perkembangan sektor properti di Kota Batam, Bank Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait antara lain REI, Developer serta perbankan, terutama mengingat kecenderungan developer di Kota Batam umumnya belum memanfaatkan peran perbankan dalam pembiayaan usahanya.

⁵ SIHPR merupakan kegiatan rutin triwulanan, kerjasama BI Batam dengan Politeknik Batam

⁶ tipe rumah kecil : luas bangunan s.d 36 m²;
tipe rumah sedang : luas bangunan >36 m² s.d 70 m²
tipe rumah besar : luas bangunan >70 m²

1.2 Perkembangan Penduduk⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau, sampai dengan bulan Juni 2006 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.274.848 jiwa, dimana sebagian besar penduduk terdapat di Kota Batam (48,33%), Kabupaten Karimun (15,74%), dan Kota Tanjung Pinang (13,15%).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
Periode Juni 2006

Kabupaten/Kota (1)	Jumlah Penduduk (2)	Persentase (3)
1. Batam	616.114	48,33
2. Karimun	200.704	15,74
3. Tanjung Pinang	167.611	13,15
4. Bintan	117.825	9,24
5. Natuna	88.914	6,97
6. Lingga	83.680	6,56
Provinsi Kepulauan Riau	1.274.848	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Kota Batam yang menempati urutan teratas berdasarkan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang berkembang di daerah tersebut, dimana sektor industri dan perdagangan memegang peranan yang cukup besar dalam perekonomian. Kedua sektor ekonomi tersebut memberikan kontribusi yang dominan terhadap ketersediaan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan proporsi penduduk Batam menjadi lebih heterogen dari Kabupaten/Kota lainnya baik dari sisi agama maupun dari sisi suku bangsa.

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2000, dapat dilihat bahwa persentase terbesar suku bangsa yang menghuni Kota Batam adalah suku bangsa Jawa (26,69%) diikuti oleh suku bangsa Melayu (20,90%) dan suku bangsa Batak (14,92%). Persebaran dan kepadatan penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh luas wilayah dan skala pembangunan saja, akan tetapi skala kegiatan pemerintahan diduga juga mempunyai pengaruh terhadap persebaran dan kepadatan penduduk. Perkiraan ini terkait dengan ketersediaan fasilitas bagi penduduk seperti sekolah, fasilitas kesehatan, jalan dan sebagainya. Dari hasil sensus tersebut juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kota Batam sebagian besar berada pada usia produktif (antara 15-64 tahun) yaitu sebesar 76,76% sedangkan untuk usia 15 tahun ke bawah sebesar 22,58% dan untuk usia 65 tahun keatas sebesar 0,66%.

Sementara itu, jumlah penduduk di Kota Tanjung Pinang berada di urutan ketiga setelah Tanjung Balai Karimun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis serta sektor ekonomi yang berkembang di daerah tersebut, dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Karimun bekerja di

⁷ berdasarkan definisi BPS yang dimaksud penduduk adalah *all residents in the entire geographical territory of the RI who have stayed for 6 months or longer and those who intend to stay even though their length of stay were less than 6 months*

sektor pertanian yang dikelompokkan dalam 5 sub sektor yaitu: tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan. Namun demikian sub sektor perikanan merupakan sektor yang paling signifikan dibanding sub sektor lainnya. Sementara sektor pertambangan di daerah Karimun menghasilkan 3 (tiga) bahan tambang/galian utama, yaitu pertambangan timah, granit dan penggalian pasir.

Sejak berdirinya Provinsi Kepulauan Riau yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004, Kota Tanjung Pinang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi dimana pusat pemerintahan untuk 2 (dua) tahun pertama bertempat di Kota Batam. Sejak Februari tahun 2006 pusat pemerintahan berada di Kota Tanjung Pinang. Hal ini diperkirakan akan mempengaruhi jumlah penduduk di kota gurindam tersebut mengingat pusat pemerintahan berada di daerah tersebut. Disamping itu, penerapan sistem *Special Economic Zone (SEZ)*⁸ yang meliputi wilayah Batam, Bintan dan Karimun akan turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan struktur penduduk di wilayah ini.

Sementara itu, hingga akhir Juni 2006, jumlah pengangguran di Kota Batam yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam mencapai 21.038 jiwa atau mencapai 1,65% dari total penduduk Kota Batam.

1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan definisi dari BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur dimaksud yang menunjukkan persentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan pada 3 (tiga) faktor yang paling esensial dalam kehidupan manusia, yaitu : kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi kelangsungan hidup dan sehat adalah angka harapan hidup, untuk mengukur dimensi pengetahuan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau, tingkat IPM Provinsi Kepulauan Riau mencapai 70,8 dan menempati urutan ke-8 dari 33 Provinsi di Indonesia. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, Kota Batam menempati urutan IPM ke-11 dari 440 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan nilai 75,8.

⁸ Uraian lebih lengkap lihat di Boks – II “Penerapan SEZ di Wilayah BBK”

Tabel 1.2
IPM Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2004

Prov/Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (tahun)	Rata-rata Lama sekolah (tahun)	Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita disesuaikan (000Rp)	IPM	Peringkat
Provinsi Kepri	68,8	94,7	8,0	613,0	70,8	8
Karimun	69,2	95,0	7,8	614,1	71,0	102
Bintan	69,0	92,3	7,1	613,9	69,7	152
Natuna	67,0	95,3	6,7	596,3	67,7	235
Lingga	68,9	90,3	7,0	605,0	67,7	236
Kota Batam	70,1	98,4	10,4	634,2	75,8	11
Kota Tj. Pinang	68,8	96,7	9,1	614,7	72,2	77

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau – diambil dari Laporan Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006

Nilai IPM yang mendukung sehingga Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai nilai IPM dengan peringkat baik didukung oleh angka harapan hidup yang masing-masing sebesar 70,1 tahun dan 68,8 tahun. Disamping itu peran angka harapan hidup tersebut juga ditunjang oleh komponen angka melek huruf dimana nilai untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 94,7% dan Kota Batam sebesar 98,4%. Secara parsial per Kab/Kota angka harapan hidup tertinggi terdapat di Kota Batam (70,1 tahun) sedangkan harapan hidup terendah terdapat di Kabupaten Natuna (67,0 tahun). Untuk Kab/Kota lainnya seperti Karimun, Bintan, Lingga dan Tanjung Pinang masing-masing sebesar 69,2 tahun, 69,0 tahun, 68,9 tahun, dan 68,8 tahun. Untuk indikator angka melek huruf, angka tertinggi terdapat di Kota Batam (98,4%) sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Lingga (90,3%).

BOKS – II

PENERAPAN *SPECIAL ECONOMIC ZONE* DI WILAYAH BATAM, BINTAN & KARIMUN (BBK)

Pulau Batam dibangun berdasarkan Inpres No.74 tahun 1971, dimana Batam dan sekitarnya dibangun berdasarkan visi bahwa Singapura dalam kurun waktu tertentu akan bersifat selektif sehingga Indonesia harus siap menerima limpahan industri barang dan jasa. Visi ini menjadi kenyataan. Namun Batam dan sekitarnya sendiri kurang berkembang, padahal Batam sudah memiliki pelabuhan udara dan laut yang memadai. Disamping itu beberapa jembatan dibangun untuk menghubungkan Batam dengan pulau-pulau yang berdekatan. Tenaga kerja juga sudah tersedia dalam jumlah yang banyak. Adapun kesulitan investasi di Batam dan sekitarnya antara lain disebabkan oleh peraturan perpajakan, pertanahan, dan perizinan investasi yang tidak kondusif. Persoalan yang terjadi di Batam salah satunya disebabkan oleh pemerintah yang tidak tegas mengimplementasikan visi untuk menjadikan Batam dan sekitarnya sebagai daerah yang kondusif untuk investasi. Pembentukan SEZ kemudian dipandang sebagai salah satu solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini, Singapura sudah mendirikan SEZ di China, India, dan Vietnam. Oleh karena itu kredibilitas Singapura dalam mengembangkan SEZ sangat baik.

SEZ merupakan suatu kerangka kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dimana penerapannya adalah untuk wilayah Batam, Bintan dan Karimun. Bentuk kerjasama tersebut telah dituangkan dalam draft kerjasama antara Indonesia dan Singapura dimana pada tanggal 25 Juni 2006 Presiden RI – Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura – Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) SEZ untuk wilayah BBK. Adapun implementasi perjanjian SEZ ini akan dievaluasi pada 4 (empat) bulan kedepan.

Persetujuan SEZ tersebut ditandatangani oleh Menko Perekonomian – Boediono dan Menteri Perdagangan & Perindustrian Singapura – Lim Hing Kiang yang berlangsung di Nongsa Point Marina – Batam. Untuk merealisasikan kesepakatan kerjasama tersebut, maka dibentuk tim perumus *Joint Steering Committee* yang diketuai Menko Perekonomian RI Boediono dan Menteri Ekonomi Singapura Lim Hing Kiang. Sedangkan pelaksanaan SEZ itu sendiri dilakukan oleh *Joint Working Committee* yang diketuai Menteri Perdagangan RI – Mari Elka Pangestu dan Ketua Pengembangan Ekonomi Singapura – Mr. Lim Siong Guan. Dalam tenggat waktu 4 (empat) bulan tim tersebut harus sudah menginventarisir masalah yang dihadapi para pengusaha dari 2 (dua) negara dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI dan PM Singapura.

Terkait dengan pengembangan SEZ di Kota Batam, Bintan dan Tanjung Balai Karimun, maka mulai tanggal 25 Juli 2006 diberlakukan pelayanan *One Stop Service* (OSS) yang bertempat di Gedung Promosi Sumatera – Batam Center. Pelayanan ini berkaitan dengan izin-izin dari Otorita Batam dan Dispenda. Adapun izin usaha dari Otorita Batam antara lain: persetujuan perizinan PMA dan PMDN, perizinan fatua planologi, pengurusan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), pengurusan izin pematangan lahan dan rekomendasi TKA (Tenaga Kerja Asing). Sementara pelayanan perizinan dari Pemko Batam melibatkan pelayanan perizinan dari 9 dinas teknis dan 3 badan yang ada. Kerjasama Otorita Batam – Pemko untuk OSS didasarkan pada UU No.32 tahun 2004 dan UU No.53 tahun 2006 serta kesepakatan kerjasama Pemko dan Otorita Batam.

Terdapat 6 (enam) esensial berkenaan dengan OSS, yaitu : (i) peningkatan pelayanan, (ii) peningkatan investasi, (iii) pemasukan pajak dan PAD, (iv) kesejahteraan sosial, (v) peningkatan hubungan kerja daerah – pusat termasuk instansi vertikal, serta (vi) sebagai syarat penerapan SEZ.

Dengan pemberlakuan SEZ di wilayah BBK, maka diharapkan peranan perbankan dalam perekonomian menjadi lebih optimal. Sentimen-sentimen positif akibat pemberlakuan SEZ ini diperkirakan akan mampu menghidupkan kembali kegiatan ekonomi di wilayah Batam, Bintan dan Karimun yang secara tidak langsung akan berdampak pada indikator-indikator makro maupun mikro. Fungsi intermediasi perbankan yang sampai dengan Semester I-2006 mengalami perlambatan diharapkan mampu meningkat kembali.

1.4 Perkembangan Tenaga Kerja

Berdasarkan data yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, sampai dengan bulan Juni 2006 jumlah tenaga kerja sektor formal sebanyak 236.793 orang dan meningkat sebesar 0,03% (72 orang) dibandingkan Desember 2005.

Dari 236.793 orang pekerja tersebut sebagian besar (76,53%) atau sebanyak 181.210 orang bekerja pada sektor industri, dan sektor lain yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel & restoran dengan jumlah pekerja masing-masing sebanyak 19.820 orang (8,37%) dan 17.659 orang (7,46%). Sementara itu, menurut jenis kelamin, sebesar 56,90% pekerja di Kota Batam adalah perempuan sedangkan pekerja laki-laki sebesar 43,10%.

Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Kota Batam

Sektor Ekonomi	Des 2005	Juni 2006						
		WNI			WNA			WNI + WNA
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1. Pertanian	2.017	1.818	192	2.010	-	-	-	2.010
2. Pertmbngn & Pengglin	751	489	241	730	6	-	6	736
3. Industri	175.825	56.164	122.684	178.848	2.248	114	2.362	181.210
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1.232	1.035	186	1.221	5	-	5	1.226
5. Bangunan	18.714	18.489	1.322	19.811	9	-	9	19.820
6. Perdgngn, Hotel & Rest	15.998	13.032	4.579	17.611	48	-	48	17.659
7. Pengangkutan & Kom	1.478	1.501	1.479	2.980	32	-	32	3.012
8. Keu, Jasa Persewaan	2.518	2.505	661	3.166	-	-	-	3.166
9. Jasa-Jasa	5.527	5.595	1.984	7.943	9	2	11	7.954
Jumlah	224.260	100.992	133.328	234.320	2.357	116	2.473	236.793

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

1.5 Perkembangan Pariwisata

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Batam hingga periode tw.II – 2006 (Semester I-2006) berjumlah 502.930 orang, menurun 9,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2005.

Tabel 1.4
Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam
Tahun 2004 – 2006

Periode	2004	2005	2006
1. Januari	126.168	124.169	82.584
2. Februari	123.263	83.677	69.254
3. Maret	134.119	83.811	83.725
4. April	90.409	79.967	86.676
5. Mei	122.141	90.924	86.834
6. Juni	142.557	90.828	93.857
Jumlah	738.657	553.376	502.930

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam – Data olahan dari Kantor Imigrasi Batam

Penurunan kunjungan wisatawan ini diperkirakan merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah Daerah terhadap sektor jasa di Kota Batam. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya upaya oleh pihak-pihak terkait untuk memanfaatkan potensi yang ada serta menciptakan *event-event* yang diperkirakan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Batam. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah *Sea Eagle Boat* yang merupakan perlombaan dayung yang diadakan di daerah Belakang Padang – Batam. Disamping itu, pada tanggal 16 Juli 2006, diadakan Festival Laut Melayu tingkat Kabupaten Bintan yang digelar di perairan Desa Sebung Perih, Kecamatan Teluk Sebung.

Sementara itu, selama semester I - 2006 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Batam masih didominasi oleh warga negara Singapura dengan kontribusi sebesar 66,11%. Namun demikian, terdapat penurunan jumlah wisatawan mancanegara Singapura (17,68%) yaitu dari 553.376 orang pada Sem I-2005 menjadi 502.930 orang pada Sem II-2006.

Tabel 1.5
Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan
Yang Berkunjung ke Kota Batam

Kebangsaan	2005			2006		
	Tw.I	Tw.II	Sem.I	Tw.I	Tw.II	Sem.I
1. Singapura	218.876	185.053	403.929	150.052	182.453	332.505
2. Malaysia	33.721	31.402	65.123	30.419	32.168	62.587
3. Korsel	11.429	17.060	28.489	22.476	18.440	40.916
4. Jepang	5.688	6.564	12.252	6.500	6.177	12.677
5. Inggris	2.630	2.358	4.988	2.490	2.449	4.939
6. Amerika	1.891	2.031	3.922	1.937	1.800	3.737
7. Taiwan	1.400	1.792	3.192	1.263	1.561	2.824
8. Australia	1.752	1.701	3.453	1.604	1.688	3.292
9. Jerman	1.027	570	1.597	634	627	1.261
10. Belanda	374	381	755	423	406	829
11. Lainnya	12.869	12.807	25.676	17.765	19.598	37.363
Jumlah	291.657	261.719	553.376	235.563	267.367	502.930

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau – Data diolah dari Kantor Imigrasi Batam

Sementara itu jumlah wisatawan yang berkunjung melalui pintu masuk Batam dan Tanjung Pinang pada tahun 2006 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2005, dimana jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui Batam menurun sebesar -11,51% dan melalui Tanjung Pinang menurun sebesar -13,60%.

Tabel 1.6
Perbandingan Jumlah Wisman Menurut Pintu Masuk di Provinsi Kepri

Pintu Masuk	Jan-Mei 2005	Jan-Mei 2006	%
1. Batam	462.548	409.321	-11,51
2. Tanjung Pinang	61.888	53.473	-13,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

1.6 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam dari sisi jumlah perusahaan meningkat cukup signifikan, yaitu dari 29 perusahaan pada periode Januari-Juni 2005 menjadi 44

perusahaan pada periode Januari-Juni 2006, atau meningkat sebesar 51,72%. Sementara itu, nilai investasi yang direncanakan (termasuk perluasan usaha) mengalami peningkatan, dari US\$ 83 juta (Januari-Juni 2005) menjadi US\$ 168,14 juta (Januar-Juni 2006) atau naik sebesar 102,58%.

Negara asal investasi pada periode Januari-Juni 2006 adalah Singapura, Korea Selatan, RRC, British Virgin Islands, Malaysia, Australia, AS, Inggris, Taiwan dan Brunei Darussalam dengan bidang usahanya berupa industri perkapalan (7 proyek), industri rokok (1 proyek), industri kemasan (1 proyek), perdagangan ekspor impor (5 proyek), industri pakaian jadi (1 proyek), jasa akomodasi (2 proyek), industri sub assv (1 proyek) dan jasa lainnya (13 proyek).

Tabel 1.7
Perkembangan Rencana Investasi Asing di Kota Batam

Periode	2005		2006	
	Jml Perusahaan Baru	Nilai *) (US\$)	Jml Perusahaan Baru	Nilai *) (US\$)
Semester I	29	82.996.927	44	168.138.111

Sumber : Subdit BKPM Otorita Batam
*Keterangan : *) termasuk perluasan usaha*

1.7 Perkembangan Pedagang Valuta Asing (PVA)

Pedagang Valuta Asing (PVA) atau yang biasa dikenal dengan *money changer* memiliki peranan yang cukup besar dalam sektor keuangan di Indonesia. Oleh karena itu Bank Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kegiatan ini, antara lain dengan mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur keberadaan PVA antara lain : Peraturan Bank Indonesia / PBI No.6/1/PBI/2004 tanggal 4 Januari 2004 tentang PVA, serta Surat Edaran / SE No.6/13/DPM tanggal 11 Maret 2004 tentang tata cara perizinan, penerapan prinsip mengenal nasabah, pengawasan, pelaporan dan pengenaan sanksi bagi PVA bukan bank.⁹

Pada umumnya, terdapat beberapa hal yang mendukung peranan PVA di Indonesia, antara lain :

- i. sebagai upaya untuk memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah, PVA merupakan lembaga penunjang sektor keuangan yang memiliki peranan yang cukup strategis khususnya dalam perkembangan pasar valuta asing domestik.
- ii. Dalam upaya mendukung peningkatan penerimaan devisa nasional melalui pengembangan pariwisata maka pelayanan dan kemampuan PVA perlu ditingkatkan.
- iii. Upaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaha yang berkesinambungan, PVA perlu melaksanakan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian termasuk *Know Your Customer* (KYC).
- iv. Turut menanggulangi tindak pidana pencucian uang, PVA mempunyai peranan yang cukup strategis dalam membantu instansi yang berwenang.

⁹ Peraturan Bank Indonesia dapat dilihat melalui <http://www.bi.go.id>

Sampai dengan tw.II-2006, jumlah PVA yang melakukan kegiatan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam berjumlah 91 PVA dimana terdapat peningkatan sebanyak 2 PVA dibandingkan tw.I-2006, yang melakukan kegiatan usaha di Kota Batam. Oleh karena itu, jumlah PVA yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Riau adalah : 65 PVA di Kota Batam, 12 PVA di Kota Tanjung Pinang, 9 PVA di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, 3 PVA di Tanjung Uban, dan 2 PVA di Tanjung Batu. Berdasarkan data yang ada, jumlah PVA yang melakukan usaha di wilker KBI Batam menempati urutan ke-3 (tiga) di Indonesia setelah Jakarta dan Denpasar. Banyaknya PVA bukan bank tersebut diperkirakan karena kemudahan perizinan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau, serta letak geografis Kota Batam yang dekat dengan wilayah negara lain yaitu Singapura, Malaysia, Thailand. Disamping itu jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di Batam juga turut mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing.

1.8 Pendapatan Perkapita Provinsi Kepulauan Riau

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. PDRB per-kapita dan pendapatan per-kapita mencerminkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di daerah setelah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Oleh karena itu, besar dan kecilnya jumlah penduduk di suatu daerah berpengaruh terhadap nilai PDRB per-kapita maupun pendapatan per-kapita.

Tabel 1.8
Pendapatan Per-Kapita Provinsi Kepulauan Riau
Periode Triwulan II – 2006

Rincian	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000
1. PDRB Provinsi tw.II-2006	Rp. 11.209.941.000.000	Rp. 8.068.888.000.000
2. Jumlah Penduduk tw.II-2006	1.274.848 orang	
3. Pendapatan Per-Kapita	Rp. 8.793.159	Rp. 6.329.294

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau – Data Diolah

Berdasarkan tabel 6, terlihat bahwa pendapatan per-kapita pada tw.II-2006 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 8.793.159, sedangkan jika dilihat secara riil (atas dasar harga konstan 2000) pendapatan per-kapita Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.6.329.294.

1.9 Sektor Ekonomi Dominan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tw.II-2006 secara triwulanan (q-t-q) diperkirakan sebesar 1,98% lebih tinggi dibandingkan tw.I-2006 yang tercatat sebesar 1,42%. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar berdasarkan lapangan usaha adalah komponen bangunan (2,68%) diikuti komponen listrik & air bersih (2,68%) dan komponen industri (2,12%). Sementara itu, berdasarkan penggunaan komponen Pembentukan Modal Tetap

Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 2,14% diikuti komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (2,09%), dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba (1,85%).

Keberadaan ekonomi suatu Kabupaten/Kota salah satunya dapat dilihat dari peranannya terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan dalam suatu provinsi. Selama 5 (lima) tahun terakhir Kota Batam merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan yang terlihat dari nilai kontribusinya yang mencapai 77% baik berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan. Sementara itu penyumbang nomor kedua adalah Kota Tanjung Pinang dengan nilai kontribusinya diatas 6%.

Tabel 1.9
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Pembentukan PDRB Provinsi Kepri
Tahun 2000 – 2004 (%)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
A. Atas dasar harga berlaku					
1. Karimun	5,57	5,66	5,91	5,78	6,12
2. Kepulauan Riau / Bintan	5,90	5,87	5,65	5,35	5,18
3. Natuna	2,12	2,25	2,40	2,63	2,86
4. Lingga	1,59	1,62	1,59	1,58	1,56
5. Batam	78,50	78,25	77,99	78,48	77,65
6. Tanjung Pinang	6,32	6,36	6,48	6,17	6,64
Provinsi Kepri	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B. Atas dasar harga konstan 2000					
1. Karimun	5,57	5,63	5,54	5,49	5,37
2. Kepulauan Riau / Bintan	5,90	5,84	5,69	5,54	5,36
3. Natuna	2,12	2,14	2,11	2,10	2,06
4. Lingga	1,59	1,60	1,59	1,58	1,54
5. Batam	78,50	78,44	78,67	78,90	79,35
6. Tanjung Pinang	6,32	6,34	6,41	6,39	6,31
Provinsi Kepri	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Batam

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2002 terjadi pergeseran pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau yang semula pada Kabupaten Bintan menjadi Kabupaten Karimun, dimana dalam 5 (lima) tahun terakhir kontribusi Kabupaten Bintan terus mengalami penurunan dari 5,90% (tahun 2000) menjadi 5,18% (tahun 2004). sedangkan kontribusi Kabupaten Karimun naik dari 5,57% (tahun 2000) menjadi 6,12% (tahun 2004).

Jika dilihat dari nilai kontribusi Kabupaten/Kota terhadap pembentukan PDRB Provinsi menurut lapangan pekerjaan, terlihat bahwa pada tahun 2004 Kota Batam merupakan penyumbang terbesar di hampir semua sektor lapangan usaha kecuali sektor pertanian dan pertambangan. Sumbangan Kota Batam pada sektor-sektor tersebut berkisar antara 43,81% sampai 91,71%. Pada sektor pertanian dan pertambangan peranan Kota Batam masih cukup signifikan karena nilai sumbangannya masih mencapai diatas 18%. Untuk sektor pertanian Kabupaten Natuna dan Karimun adalah penyumbang terbesar terhadap nilai PDRB Provinsi di sektor ini dimana sekitar 60% nya merupakan sumbangan dari kedua Kabupaten tersebut. Sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian, Kabupaten Kepri / Bintan dan Karimun menyumbang hampir 80% dari PDRB Provinsi.

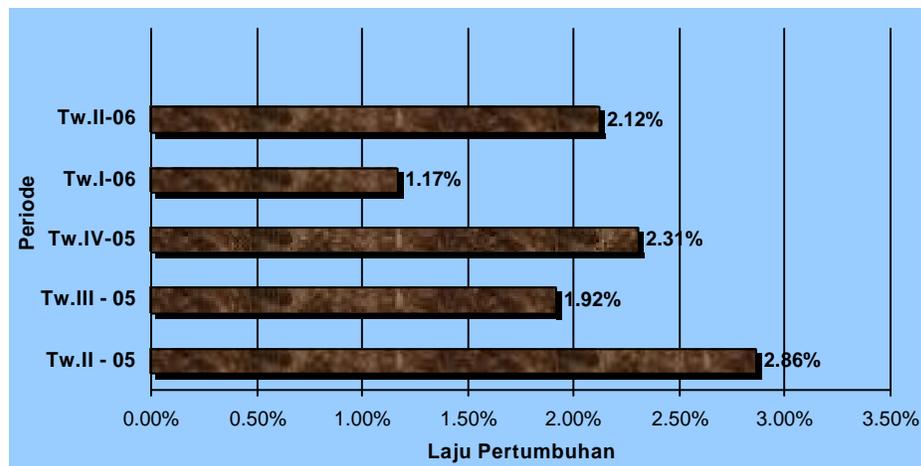
1.9.1 Sisi Penawaran / Produksi

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau selama tw.II-2006 masih didominasi oleh sektor industri dengan kontribusi sebesar 59,38% diikuti oleh sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 10,81%, sedangkan sektor-sektor lain yang cukup berperan dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau adalah sektor perdagangan hotel & restoran, sektor keuangan, dan sektor pertanian. Sektor industri berkembang di Kota Batam dan Kabupaten Bintan, sedangkan sektor pertambangan & penggalian bertumpu pada pertambangan migas di Kabupaten Natuna. Sementara itu sektor perdagangan merupakan sektor unggulan di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun, serta sektor pertanian menjadi sektor andalan Kabupaten Lingga.

1.9.1.1 Komponen Industri Pengolahan¹⁰

Wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau meliputi 6 Kabupaten/Kota, yaitu : Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna. Berdasarkan nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau, komponen industri memiliki nilai terbesar atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000¹¹, serta memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri merupakan komponen utama pendukung perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Grafik 1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Provinsi Kepulauan Riau
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005
Periode 2005 – 2006



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

¹⁰ Berdasarkan klasifikasi dari BPS, kegiatan sektor industri pengolahan mencakup 3 sektor, yaitu: industri pengilangan minyak bumi, industri pengolahan non-migas, dan industri pengilangan gas alam cair

¹¹ Perhitungan dan nilai tambah untuk sub sektor industri besar/ sedang digunakan pendekatan produksi, dan untuk output & nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 digunakan metode deflasi

Sektor industri menjadi sektor andalan Kota Batam, serta Kabupaten Bintan (semula bernama Kabupaten Kepulauan Riau) dengan kawasan industri Lobamnya. Mengingat cukup besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor industri terhadap perekonomian daerah, maka pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem *Special Economic Zone* (SEZ) di wilayah Batam-Bintan-Karimun (BBK). Untuk mendukung kegiatan perekonomian khususnya di Kota Batam, maka pemerintah memberikan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan, antara lain: fasilitas jalan raya dan jembatan, fasilitas pelabuhan laut dan udara, tenaga listrik dan telekomunikasi, persediaan air bersih, berbagai macam fasilitas umum (hotel, bank, perusahaan asuransi, ekspedisi, pusat perbelanjaan, sekolah, kesehatan, tempat peribadatan, fasilitas olahraga).

1.9.1.2 Komponen Pertambangan

Sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar kedua pada tw.II-2006 yaitu sebesar 10,81% dimana kontribusi minyak dan gas bumi sebesar 9,47% sementara pertambangan tanpa migas (0,86%) dan penggalian (0,48%) memberikan kontribusi yang tidak terlalu signifikan. Adapun daerah yang memberikan kontribusi migas pada PDRB Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Natuna.

Meskipun pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2005-2006 terus mengalami pertumbuhan namun tren pertumbuhannya cenderung menurun, hal ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan pertambangan migas mengalami penurunan dimana pada tw.II-2005 sebesar 0,21%, dan pada tw.III-2005 terjadi peningkatan laju pertumbuhan yaitu sebesar 3,04%, namun pada tw.IV-2005 terjadi perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar -1,31%. Kemudian pada tahun 2006 terdapat perbaikan laju pertumbuhan yang cukup baik yaitu sebesar 0,21% (tw.I-2006) dan 1,49% (tw.II-2006).

Di samping Kabupaten Natuna, kontribusi sektor pertambangan juga disumbangkan oleh wilayah Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Terdapat 3 (tiga) bahan tambang/galian utama yang dihasilkan di daerah ini antara lain : pertambangan timah, pertambangan granit, dan penggalian pasir. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Karimun (data yang diperoleh s/d tahun 2002), produksi pertambangan granit yang tercatat pada tahun 2002 adalah sebanyak 5.103.690.000 m³ dengan jumlah iuran sebanyak Rp.15.774.603.731. Untuk produksi timah, pada tahun 2002 tercatat sebanyak 6.237.300 ton. Sementara itu, penggalian pasir darat tercatat sebanyak 1.359.450.000 ton, sedangkan penggalian pasir laut belum ada data yang tersedia.

1.9.1.3 Komponen Perdagangan

Sebagai daerah yang menjadi salah satu kawasan pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapore – *Growth Triangle*), Provinsi Kepulauan Riau memiliki berbagai macam keunggulan, diantaranya adalah : letaknya yang strategis karena berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja yang berada dijalur pelayaran internasional serta memiliki potensi sumber daya alam. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya tersebut, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Oleh karena itu, sektor perdagangan menjadi salah satu sektor unggulan disamping sektor-sektor ekonomi lainnya. Daerah yang menjadikan sektor perdagangan menjadi kegiatan ekonomi unggulan diantaranya adalah Kabupaten Tanjung Balai Karimun dan Kota Tanjung Pinang. Adapun sektor perdagangan terbagi dalam 3 sub-sektor, yaitu : sub-sektor perdagangan, sub-sektor hotel, dan sub-sektor restoran.

Dengan ditetapkannya Kota Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, maka saat ini terdapat 3 (tiga) pemerintahan di Kota ini, yaitu : sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Kepulauan Riau. Kota ini memiliki beragam kultur budaya suku dari hampir seluruh Indonesia yang masuk ke kota ini dengan bahasa melayu yang masih tergolong klasik. Hal ini menjadi salah satu potensi untuk sektor ekonomi terutama sektor perdagangan yang sebelumnya telah menjadi sektor andalan di daerah ini. Disamping itu, sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan di Kota ini turut mempengaruhi sub-sektor perdagangan diantaranya sub-sektor hotel dan sub-sektor restoran.

1.9.1.4 Komponen Keuangan

Komponen keuangan memberikan distribusi sebesar 5,57% terhadap total PDRB Provinsi Kepulauan Riau tw.II-2006. Sub-sektor Bank¹² memberikan sumbangan sebesar 3,81% dan sub-sektor sewa bangunan sebesar 1,54%. Perkembangan sub-sektor perbankan di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik dimana data-data indikator perbankan terus meningkat, antara lain pada : jumlah bank yang beroperasi (bank umum dan BPR), total asset, total Dana Pihak Ketiga (DPK), serta jumlah kredit yang disalurkan.

¹² meliputi Bank Indonesia (BI) dan bank umum pemerintah & swasta serta BPR

1.9.1.5 Komponen Pertanian

Sebagai daerah yang 96%-nya merupakan perairan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang besar pada sektor perikanan. Hal ini ditunjukkan dari besarnya kontribusi sub-sektor perikanan pada pembentukan PDRB daerah yaitu sebesar 3,74% pada tw.II-2006. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala pengembangan potensi tersebut seperti masih maraknya praktek *illegal fishing* dan *illegal logging* serta rusaknya terumbu karang yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem sehingga menurunkan kualitas alam itu sendiri.¹³

¹³ Disampaikan pada laporan kegiatan di daerah Provinsi Kepulauan Riau oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah – RI

BOKS – III

PELABUHAN IKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Potensi perikanan di Tanjung Pinang selama ini dianggap kurang digarap secara lebih profesional. Sebanyak 536 unit kapal motor dan 362 perahu tanpa motor melaksanakan aktivitas perikanannya di 10 (sepuluh) pelantar rakyat, 4 (empat) pelantar di KUD, 3 (tiga) di pelantar Kampung Bugis, dan masing-masing 1 (satu) di pelantar Tanjung Unggat, Pelantar Asam, dan pelantar Dompok.

Selain 10 (sepuluh) pelantar tersebut, masyarakat nelayan melaksanakan aktivitas perikanannya di pelantar-pelantar rumah tangga nelayan (RTN). Jumlah RTN tersebut mencapai sekitar 1.346 unit yang tersebar di daerah-daerah pesisir Tanjung Pinang. Sebagai informasi, total hasil penangkapan ikan pada tahun 2005 tercatat sebesar 8.171.640 ton.

Belum adanya pelabuhan perikanan yang cukup memenuhi syarat teknis menyebabkan hasil tangkapan nelayan belum terakomodir secara terpadu sehingga potensi perikanan belum dapat digali secara optimal.

Latar belakang itulah yang mendorong Pemko Tanjung Pinang untuk mengajukan permohonan pembangunan pelabuhan pendaratan perikanan di kawasan Dompok. Kompleks pelabuhan pendaratan perikanan yang diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp.23 miliar tersebut sudah mulai dibangun untuk tahun anggaran 2006. Pemko Tanjung Pinang juga pada penyusunan anggaran perubahan APBD tahun 2005 yang lalu telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk studi kelayakan dan pembuatan *detail engineering design* (DED). Dalam RAPBD 2006, Pemko kembali menganggarkan dana sekitar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk persiapan dan pembebasan lahan.

Kompleks pelabuhan pendaratan perikanan di kawasan Dompok tersebut mencakup pasar rakyat, pabrik es, kantor CIQP pelabuhan, instalasi air bersih, balai pertemuan nelayan, koperasi nelayan, pasar ikan, tempat pelelangan ikan, masjid, stasiun pengisian BBM, *docking* kapal, dan arel parkir seluas 7.000 m². Kawasan tersebut akan menjadi pusat pengelolaan perikanan dan kelautan Tanjung Pinang. Dengan adanya pelabuhan pendaratan perikanan di kawasan Dompok tersebut, diharapkan akan memberikan pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan secara lebih signifikan.

Mengingat wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar merupakan perairan, maka sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor potensial yang perlu dikembangkan agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kemajuan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Batam adalah dengan mengadakan pertemuan dan rapat koordinasi dengan perbankan serta instansi terkait untuk memperoleh informasi mengenai hambatan dan kebutuhan masyarakat salah satunya adalah nelayan (terkait dengan sektor perikanan) dalam upaya peningkatan kegiatan usahanya. Sedangkan untuk sektor perbankan, KBI Batam memberikan himbauan kepada perbankan baik bank umum maupun BPR untuk dapat menggali potensi calon debitur di sektor pertanian dan perikanan.

Terkait dengan upaya pengembangan masyarakat pesisir di wilayah Kepri yang sebagian besar merupakan nelayan, diusulkan agar pemerintah daerah menyediakan dan membangun sarana serta fasilitas infrastruktur untuk mendukung potensi sektor ini. Disamping itu, nelayan di masyarakat pesisir yang berada di wilayah Kepri saat ini masih melakukan usahanya secara tradisional dengan pengetahuan dan teknologi yang terbatas. Untuk itu, pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan secara intensif untuk meningkatkan kemampuan serta teknologi di sektor ini, sedangkan untuk kebutuhan modal nelayan maka dapat dimanfaatkan peran koperasi dan perbankan.

Sumber : Harian Batam Pos, 2 Agustus 2006

Terkait dengan pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia, Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan departemen kelautan dan perikanan dalam upaya pemberdayaan KKMB di bidang kelautan dan perikanan. Uraian lebih lengkap dapat dilihat di Boks – IV.

BOKS – IV

BANK INDONESIA DAN DEPARTEMEN KELAUTAN & PERIKANAN BEKERJASAMA BERDAYAKAN KKMB DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Deputi Gubernur Bank Indonesia – Siti Ch. Fadrijah dan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan – Martani Husaini, menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka Pelatihan Konsultan Keuangan/Pendampingan UMKM Mitra Bank (KKMB) dan Penyusunan Buku Pola Pembiayaan Komoditi Unggulan Sektor Kelautan dan Perikanan, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 di Jakarta. Perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama mengenai “Pengembangan KKMB di Sektor Kelautan dan Perikanan”, yang telah ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 Januari 2006.

“Pemberdayaan KKMB didasari visi untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan kepada UMKM yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara UMKM dengan bank. Keberhasilan KKMB akan nampak dari beberapa indikator seperti meningkatnya jumlah UMKM yang *bankable* dan memperoleh kredit dari bank serta lancar pengembaliannya, meningkatnya kualitas dan produktifitas pelayanan KKMB dan tumbuhnya kemampuan KKMB untuk membiayai dirinya sendiri (swadana)” demikian Siti Ch. Fadrijah dalam sambutannya.

Selama tahun 2005 sampai Mei 2006, Bank Indonesia telah memberikan pelatihan kepada 1.721 KKMB dan KKMB telah berhasil memfasilitasi pencairan kredit sebesar Rp.169,8 miliar kepada 3.734 UMKM. Selain pelatihan, dalam rangka bantuan teknis, Bank Indonesia menyediakan informasi yang dibutuhkan UMKM seperti menyusun pola pembiayaan (*lending model*) untuk komoditas unggulan yang hingga tahun 2005 telah mencakup 76 komoditi, termasuk 10 komoditi di sektor kelautan dan perikanan. Disamping itu, untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah yang makin pesat beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia selama tahun 2006 akan menerbitkan buku pola pembiayaan dengan sistem syariah untuk 15 komoditi termasuk usaha budi daya pendederan dan pembesaran ikan gurami.

Untuk mengoptimalkan upaya yang dilakukan, peran serta aktif seluruh pihak yang peduli dengan pengembangan UMKM sangat diharapkan untuk menetapkan langkah terbaik dengan tetap menghargai otonomi masing-masing pihak. Selain itu, diperlukan keterpaduan antara *financial assistance* dengan *technical assistance* berupa program pendampingan dari instansi/dinas terkait atau penyediaan infrastruktur secara bersamaan (*full pledge service*).

Untuk wilayah kerja KBI Batam, saat ini proses pembentukan KKMB sedang dalam tahap pembentukan satuan tugas pembentukan KKMB. Bank Indonesia Batam berupaya untuk memfasilitasi pembentukan KKMB tersebut melalui berbagai upaya, antara lain pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Diharapkan dengan terbentuknya KKMB ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung sektor usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Kepulauan Riau.

1.9.2 Sisi Permintaan / Penggunaan

PDRB menurut penggunaan diperoleh dengan menghitung seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi oleh berbagai golongan masyarakat, meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi

lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan barang modal tetap bruto (PMTB), perubahan stok, dan ekspor neto.

Selama tw.II-2006 pertumbuhan terbesar terdapat pada komponen pembentukan barang modal tetap bruto (PMTB) sebesar 2,14% (q-t-q), diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 2,09%, dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 1,85%.

PMTB mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri/wilayah dan barang modal baru atau bekas dari luar negeri/wilayah yang digunakan untuk memproduksi di dalam negeri/wilayah.

1.10 Perkembangan Ekspor dan Impor di Wilayah Kerja Batam

Total ekspor non-migas dari wilayah Batam selama periode Januari s/d Mei 2006 sebesar US\$. 2.074.500.417 dengan volume ekspor berjumlah 8.457.060.674 kg. Komponen yang memiliki nilai ekspor terbesar adalah komponen *capital goods parts and accesories* (US\$. 680.905.049), sedangkan komponen yang memiliki volume ekspor terbesar adalah komponen *Industrial Supplies Not Elsewhere Specified* (7.838.459.712 kg).

Sementara itu total impor non-migas ke wilayah Batam selama periode Januari s/d Mei 2006 sebesar US\$.404.171.265 dengan volume impor berjumlah 404.649.661 kg. Komponen yang memiliki nilai serta volume impor terbesar tersebut adalah komponen *Industrial Supplies Not Elsewhere Specified (Processed)*. Total impor yang tercatat di wilayah Batam bernilai tidak terlalu besar karena status Batam sebagai wilayah khusus (sebagai wilayah *Free Trade Zone – FTZ*, yang selanjutnya menjadi *Bonded Zone Plus – BZP*, dan saat ini sebagai *Special Economic Zone – SEZ*) menyebabkan proses masuknya barang ke dalam wilayah pabean RI melalui Batam tidak dicatat sebagai impor.

Secara nasional, nilai ekspor bulan Mei mencapai US\$. 8,34 miliar atau meningkat 9,79% dibandingkan bulan April 2006 (US\$. 7,59 miliar). Sedangkan selama bulan Januari – Mei 2006 total ekspor Indonesia mencapai US\$. 38,39 miliar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2005 (y-o-y) sebesar US\$.33,85 miliar.

Bab 2

Perkembangan Inflasi¹⁴

2.1 KONDISI UMUM

Pada tw.II-2006, kecenderungan pergerakan harga di Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kota Batam mengalami inflasi sebesar 0,40% dan sedikit melambat dibandingkan tw.I-2006 yang tercatat sebesar 0,66%. Secara bulanan, deflasi yang terjadi pada bulan Maret 2006 (0,75%) masih terjadi pada bulan April dan Mei 2006 yaitu masing-masing sebesar 0,56% dan 0,02%.

Laju inflasi Kota Batam secara triwulanan (q-t-q) pada tw.II-2006 berada dibawah laju inflasi Padang (0,71%), Pekanbaru (1,63%) dan nasional (2,87%). Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok kesehatan (0,44%), kelompok pendidikan rekreasi & olahraga (0,36%), serta kelompok sandang (0,35%).

Sementara itu, secara tahunan (y-o-y) laju inflasi Kota Batam pada bulan Juni 2006 - Juni 2005 sebesar 11,68% dan lebih tinggi dibandingkan periode Juni 2005 – Juni 2004 yang tercatat sebesar 5,73%. Kenaikan laju inflasi ini diperkirakan akibat kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005 yang memberikan dampak terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Sementara itu, laju inflasi wilayah lain (y-o-y) pada bulan Juni 2006-Juni 2005 untuk nasional sebesar 15,53%, Padang sebesar 16,47%, dan Pekanbaru sebesar 15,67%.

Sesuai dengan UU No.3/2004 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mulai Juli 2005, BI mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan moneter yang baru konsisten dengan *Inflation Targeting Framework* (ITF). Pengimplementasian kerangka kerja tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan tata kelola (*governance*) kebijakan moneter dalam mencapai kestabilan harga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Laju inflasi di Kota Batam diukur dengan menggunakan nilai variabel Indeks Harga Konsumen (IHK)¹⁵ yang berfungsi untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Nilai IHK secara nasional dilakukan atas dasar survei bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283 – 397 jenis barang / jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas.

¹⁴ Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus (dikutip dari Boediono, *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.5; Teori Moneter, BPFE-1982 Bab VIII*)

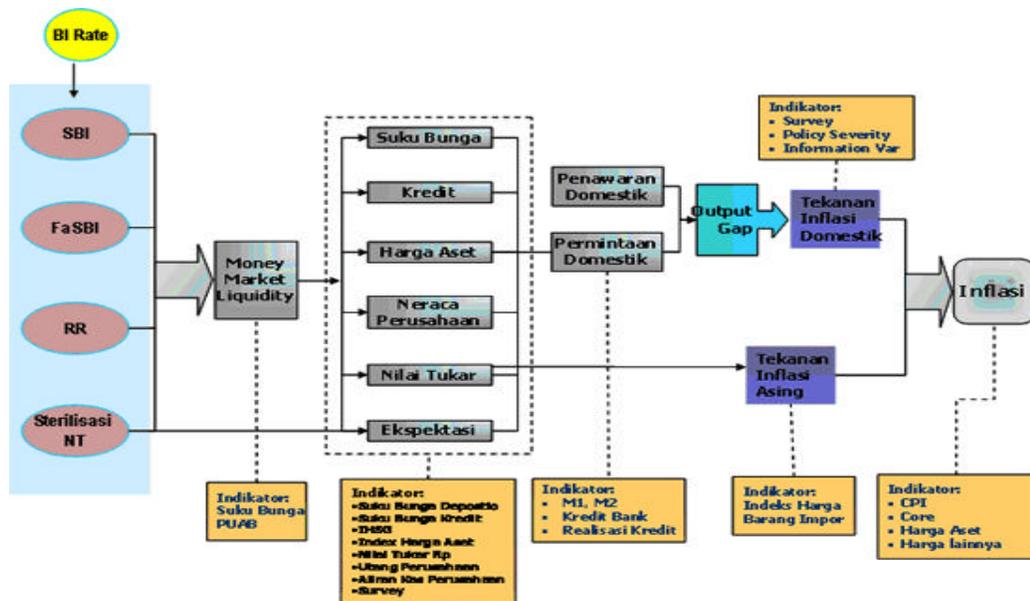
¹⁵ Uraian IHK selengkapnya dapat dilihat di Boks - VI

BOKS – V

PERAN KEBIJAKAN MONETER UNTUK MENGENDALIKAN INFLASI

Tugas Bank Indonesia tidak sepenuhnya dapat mengendalikan inflasi, terutama tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran (*cost push inflation*). Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dapat mempengaruhi inflasi dari sisi permintaan, seperti investasi dan konsumsi masyarakat. Misalnya, kenaikan suku bunga dapat memperlambat pengeluaran masyarakat dan pemerintah sehingga dapat menurunkan permintaan secara keseluruhan yang pada akhirnya dapat menurunkan inflasi. Selain itu, kenaikan suku bunga ini dapat menguatkan nilai tukar melalui peningkatan *interest rate differential*. Demikian juga, BI dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat melalui kebijakan yang konsisten dan kredibel. Harapannya adalah sasaran (target) inflasi BI diacu oleh masyarakat dan pelaku ekonomi sehingga inflasi yang terjadi dapat sama atau mendekati sasaran inflasi. Apabila kondisi ini terjadi, maka biaya pengendalian moneter dapat diminimalkan.

Secara teori, kebijakan moneter dapat ditransmisikan melalui berbagai jalur (*channel*), yaitu jalur suku bunga, jalur kredit perbankan, jalur neraca perusahaan, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Dengan melewati jalur-jalur tersebut, kebijakan moneter akan ditransmisikan dan berpengaruh ke sektor finansial dan sektor riil setelah beberapa waktu lamanya (*lag of monetary policy*)*.



Selain kebijakan moneter yang bersifat "langsung" seperti di atas, bank sentral juga dapat mempengaruhi tujuan akhirnya secara "tidak langsung", yaitu melalui berbagai regulasi dan himbauan (*moral suassion*) kepada sektor perbankan guna mempercepat mekanisme transmisi kebijakan moneter.

Dalam melaksanakan pengendalian moneter Bank Indonesia diberikan kewenangan dalam menggunakan instrumen moneter berupa tetapi tidak terbatas pada (i) Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*), (ii) penetapan tingkat diskonto (*discount rate*), (iii) penetapan Giro Wajib Minimum (*minimum reserve requirement*), dan (iv) pengaturan kredit atau pembiayaan.

*Berdasarkan penelitian terkini di Bank Indonesia, *lag of monetary policy* berkisar antara 4 s.d 6 triwulan.

2.2 LAJU INFLASI/DEFLASI BULANAN (m-t-m)

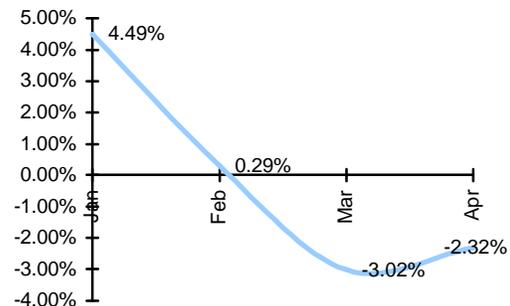
Selama tw.II-2006 (bulan April s/d Juni 2006), pergerakan harga kelompok komoditi di Kota Batam cenderung menurun dimana pada bulan April dan Mei 2006 terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,56% dan 0,02% dan pada bulan Juni 2006 terdapat inflasi sebesar 0,19%.

2.2.1 LAJU INFLASI/DEFLASI BULAN APRIL 2006

Pada bulan April 2006, pergerakan harga komoditi di Kota Batam cenderung menurun, sehingga terjadi deflasi sebesar 0,56%. Sementara itu secara nasional, terjadi inflasi sebesar 0,05%. Faktor utama penyebab terjadinya deflasi di Kota Batam pada bulan ini adalah perlambatan laju pergerakan harga bahan makanan (2,32%), dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau (0,05%).

Deflasi bulanan **kelompok bahan makanan** mencapai 2,32%, sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,02%. Pendorong dominan penurunan harga kelompok ini adalah sub-kelompok padi-padian (4,55%); kelompok daging & hasil-hasilnya (3,56%); kelompok bumbu-bumbuan (5,60%).

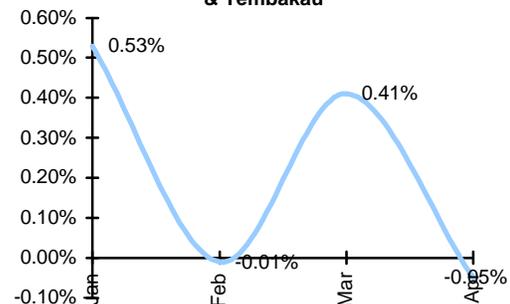
Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau pada bulan April 2006 mengalami deflasi sebesar 0,05% dan menurun dibandingkan bulan Maret 2006 yang sebesar 0,41%. Pendorong terbesar terjadinya deflasi pada kelompok ini adalah sub-kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 0,32%.

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Makanan jadi, Minuman, Rokok & Tembakau

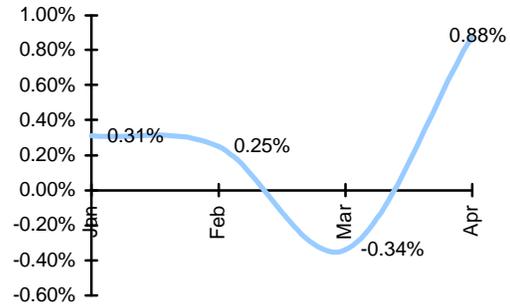


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar pada bulan April 2006 mengalami inflasi sebesar 0,03% dan relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Kelompok sandang bulan April 2006 mengalami inflasi sebesar 0,88% dan meningkat cukup signifikan dibandingkan bulan lalu yang mengalami deflasi sebesar 0,34%. Penyumbang terbesar terhadap pembentukan inflasi berasal dari sub-kelompok barang pribadi dan sandang lainnya sebesar 3,92%.

Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Sandang



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada bulan April 2006, dari 45 kota di Indonesia yang diamati perkembangan harganya, sebanyak 22 kota mengalami kenaikan harga (inflasi) dan 23 kota mengalami penurunan harga (deflasi). Inflasi tertinggi terjadi di Banjarmasin sebesar 1,99% dan inflasi terendah di Kota Ternate sebesar 0,13%. Deflasi terbesar terjadi di Kota Gorontalo sebesar 1,71% dan deflasi terkecil di Kota Balikpapan sebesar 0,05%.

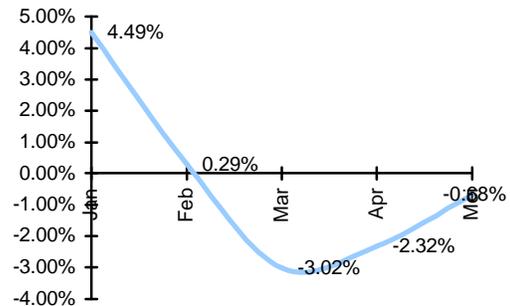
Kota Batam mengalami deflasi sebesar 0,56% pada bulan April 2006 dan memberikan sumbangan sebesar -0,01% terhadap pembentukan inflasi nasional.

2.2.2 LAJU INFLASI/DEFLASI BULAN MEI 2006

Pada bulan Mei 2006, pergerakan harga komoditi di Kota Batam masih cenderung menurun, sehingga terjadi deflasi sebesar 0,02%. Sementara itu secara nasional, terjadi inflasi sebesar 0,37%. Faktor utama penyebab terjadinya deflasi di Kota Batam pada bulan ini adalah perlambatan laju pergerakan harga bahan makanan (0,68%).

Deflasi bulanan **kelompok bahan makanan** mencapai 0,68%, sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,32%. Pendorong dominan penurunan harga kelompok ini adalah sub-kelompok sayur-sayuran (3,72%); sub-kelompok ikan segar (2,54%); dan sub-kelompok daging & hasil-hasilnya (1,07%).

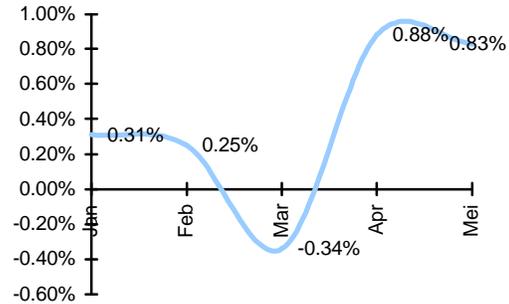
Grafik 2.4 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kelompok Sandang pada bulan Mei 2006 mengalami inflasi sebesar 0,83% dan menurun dibandingkan bulan April 2006 yang sebesar 0,88%. Pendorong terbesar terjadinya inflasi pada kelompok ini adalah sub-kelompok barang pribadi dan sandang lain sebesar 3,66%.

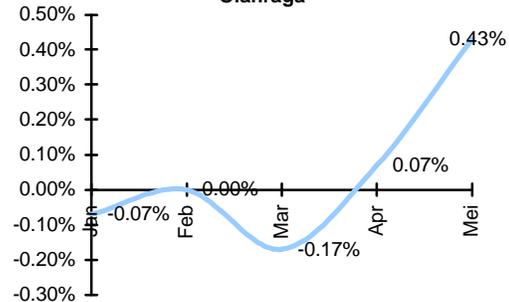
Grafik 2.5 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Sandang



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga bulan Mei 2006 mengalami inflasi sebesar 0,43% dan meningkat cukup signifikan dibandingkan bulan lalu yang mengalami inflasi sebesar 0,07%. Penyumbang terbesar terhadap pembentukan inflasi berasal dari sub-kelompok rekreasi sebesar 1,41%.

Grafik 2.6 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada bulan Mei 2006, dari 45 kota di Indonesia yang diamati perkembangannya, sebanyak 37 kota mengalami kenaikan harga (inflasi) dan 8 kota mengalami penurunan harga (deflasi). Inflasi tertinggi terjadi di Banda Aceh sebesar 3,14% dan inflasi terendah di Kota Serang/Cilegon sebesar 0,04%. Deflasi terbesar terjadi di Kota Ambon sebesar 1,41% dan deflasi terkecil di Kota Batam dan Samarinda sebesar 0,02%.

Kota Batam mengalami deflasi sebesar 0,02% pada bulan April 2006 dan memberikan sumbangan sebesar 0,00% terhadap pembentukan inflasi nasional.

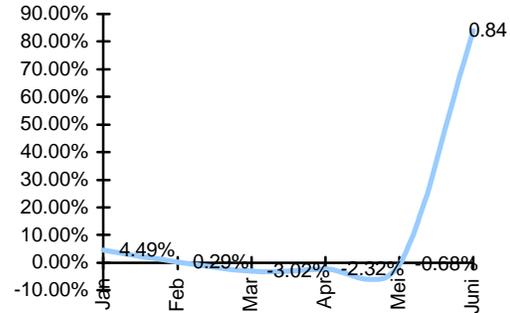
2.2.3 LAJU INFLASI/DEFLASI BULAN JUNI 2006

Pada bulan Juni 2006, pergerakan harga komoditi di Kota Batam cenderung meningkat, sehingga terjadi inflasi sebesar 0,19%. Sementara itu secara nasional, terjadi inflasi sebesar 0,45%. Faktor utama penyebab terjadinya inflasi di Kota Batam pada bulan Juni adalah peningkatan laju pergerakan harga bahan makanan yang cukup signifikan (0,84%), meskipun terdapat penurunan laju pergerakan harga pada beberapa kelompok komoditi, yaitu : kelompok

sandang sebesar 1,36%, kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga sebesar 0,14%, dan kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan sebesar 0,01%.

Inflasi bulanan **kelompok bahan makanan** mencapai 0,84%, meningkat cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang terjadi deflasi sebesar 0,68%. Pendorong dominan peningkatan harga kelompok ini adalah sub-kelompok buah-buahan (3,21%); sub-kelompok ikan segar (3,10%); dan sub-kelompok padi-padian, umbi-umbian & hasilnya (2,34%).

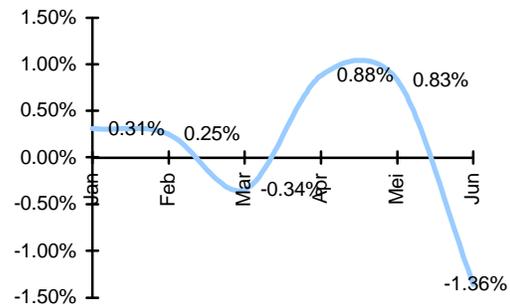
Grafik 2.7 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kelompok Sandang pada bulan Juni 2006 mengalami deflasi sebesar 1,36% dan menurun dibandingkan bulan Mei 2006 yang terjadi inflasi sebesar 0,83%. Pendorong terbesar terjadinya deflasi pada kelompok ini adalah sub-kelompok barang pribadi dan sandang lain sebesar 6,28%.

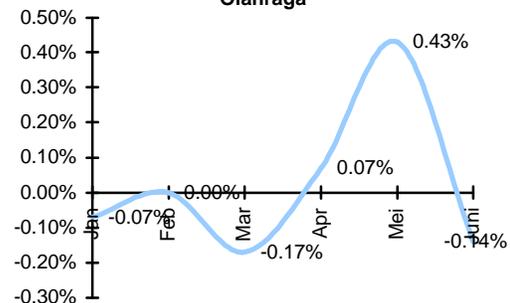
Grafik 2.8 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Sandang



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga bulan Juni 2006 mengalami deflasi sebesar 0,14% dan menurun cukup signifikan dibandingkan bulan lalu yang mengalami inflasi sebesar 0,43%. Penyumbang terbesar terhadap pembentukan deflasi berasal dari sub-kelompok rekreasi sebesar 0,46%.

Grafik 2.9 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada bulan Juni 2006, dari 45 kota di Indonesia yang diamati perkembangan harganya, sebanyak 42 kota mengalami kenaikan harga (inflasi) dan 3 kota mengalami penurunan harga (deflasi), yaitu : Manado, Ternate, dan Pangkalpinang.

Kota Batam mengalami inflasi sebesar 0,19% pada bulan Juni 2006 dan memberikan sumbangan sebesar 1,72% terhadap pembentukan inflasi nasional.

2.3 LAJU INFLASI/DEFLASI TRIWULANAN (q-t-q)

Secara triwulanan, laju pergerakan harga komoditi di Kota Batam cenderung mengalami perlambatan (deflasi) sebesar 0,39%. Hal ini disebabkan oleh deflasi pada bulan April dan Mei 2006 yang cukup besar.

Tabel 2.1
Perkembangan Laju Inflasi di Kota Batam Tahun 2006

Kelompok Komoditi	Jan	Feb	Mar	Tw. I	Apr	Mei	Jun	Tw.II
Umum	1,32	0,10	(0,75)	0,67	(0,56)	(0,02)	0,19	(0,39)
1. Bahan Makanan	4,49	0,29	(3,02)	1,76	(2,32)	(0,68)	0,84	(2,16)
2. Makanan jadi, minman, rokok & tembakau	0,53	(0,01)	0,41	0,93	(0,05)	0,19	0,11	0,25
3. Perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar	0,08	0,03	0,03	0,14	0,03	0,19	0,02	0,24
4. Sandang	0,31	0,25	(0,34)	0,22	0,88	0,83	(1,36)	0,35
5. Kesehatan	0,29	0,07	0,20	0,56	0,12	0,00	0,32	0,44
6. Pendidikan, rekreasi & olahraga	(0,07)	0,00	(0,17)	(0,24)	0,07	0,43	(0,14)	0,36
7. Transport, Komunikasi & jasa keuangan	0,02	0,00	0,08	0,10	0,00	0,12	(0,01)	0,11

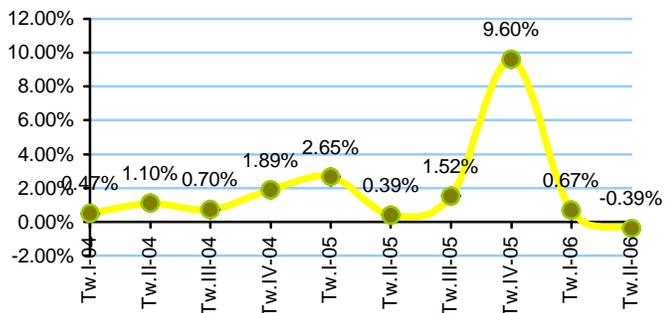
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data pada tabel 2.1 terlihat bahwa terdapat kecenderungan penurunan laju pergerakan tingkat harga komoditi di Kota Batam secara triwulanan yaitu dari 0,67% (tw.I-2006) menjadi -0,39% (tw.II-2006). Penurunan harga ini sebagian besar dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan yang turun cukup signifikan yaitu dari 1,76% (tw.I-2006) menjadi -2,16% (tw.II-2006). Sementara itu, kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau masih mengalami inflasi, meskipun terjadi perlambatan laju kenaikan harga.

Pada tw.II-2006, tingkat inflasi tertinggi terdapat pada kelompok kesehatan yang mencapai 0,44% dan kelompok pendidikan rekreasi & olahraga yang mencapai 0,36%.

Grafik 2.10 Perkembangan Harga Komoditi di Kota Batam

Dari grafik 2.10 disamping terlihat bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir Kota Batam selalu mengalami inflasi, sedangkan deflasi baru terjadi pada tw.II-2006.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

BOKS – VI

PENGENALAN INFLASI DI INDONESIA

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Terdapat 2 (dua) indikator inflasi, yaitu:

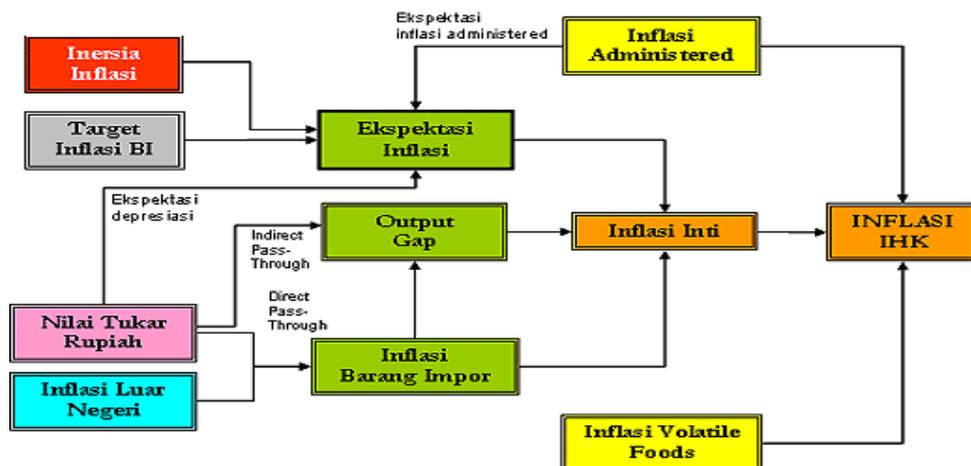
- a. Indeks Harga Konsumen (IHK)
- b. Indeks Harga Perdagangan Besar, merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah.

Disagregasi Inflasi :

1. Inflasi Inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental, antara lain : (i) interaksi permintaan – penawaran, (ii) lingkungan eksternal – nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang, (iii) ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.
2. Inflasi non Inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental, terdiri dari:
 - inflasi *Volatile Food*
inflasi yang dipengaruhi shocks dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, gangguan penyakit.
 - inflasi *Administered Prices*
inflasi yang dipengaruhi shocks berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*) dan terjadinya *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya.

Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR).



2.4 SURVEI KEGIATAN DUNIA USAHA (SKDU)¹⁶

Pelaksanaan survei kegiatan dunia usaha bertujuan untuk mendapatkan informasi dini mengenai indikasi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil, dimana hasil survei merupakan salah satu pendekatan/proksi kegiatan usaha, disamping sebagai salah satu komponen/variabel pembentuk *leading economy indicator*. Adapun responden pada survei tersebut adalah perusahaan yang termasuk menengah ke atas berdasarkan nilai produksi/penjualan/penghasilan operasional/jumlah tenaga kerjanya. Pengambilan sampel untuk kegiatan ini dilakukan dengan metode *stratified purposive sampling*. Dimana stratifikasi berdasarkan sektor ekonomi, daerah/regional, nilai usaha yang diukur dari produksi/penjualan/penghasilan operasional/jumlah tenaga kerjanya.

Secara umum, kegiatan dunia usaha pada tw.II-2006 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (diwakili oleh Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang) sedikit mengalami peningkatan setelah sebelumnya mengalami berbagai tantangan akibat kondisi perekonomian makro yang kurang kondusif. Saat ini perekonomian Indonesia umumnya, dan Kepulauan Riau khususnya berangsur-angsur mulai menunjukkan pemulihan kearah yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan pada jawaban responden dimana hampir semua sektor sudah mulai meningkatkan produksinya yang sebelumnya sebagian besar responden merasakan dampak yang cukup berat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada tw.IV-2005.

Berdasarkan hasil SKDU, para pengusaha di wilayah Batam dan Tanjung Pinang memperkirakan laju inflasi pada tw.III-2006 secara rata-rata sebesar 9% (y-o-y), meningkat dibandingkan prakiraan inflasi triwulan sebelumnya (7,6%).

¹⁶ pelaksanaan survey kegiatan dunia usaha (SKDU) dilakukan setiap triwulanan dan merupakan kerjasama BI dengan BPS Provinsi Kepri.

Bab 3

Perkembangan Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran

3.1 KONDISI UMUM

Kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tw.II-2006 menunjukkan peningkatan dibandingkan tw.I-2006. Peningkatan kinerja tersebut tercermin dari angka pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku secara triwulanan meningkat sebesar 3,03% (q-t-q) pada tw.II-2006. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 secara triwulanan meningkat sebesar 1,98%, angka tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDRB pada tw.I-2006 yang mencapai 1,42%. Sementara itu, jumlah uang giral dan uang kuasi di wilayah kerja KBI Batam pada tw.I-2006 juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, demikian pula dengan indikator-indikator perbankan, seperti: total aset, Dana Pihak Ketiga dan penyaluran kredit oleh perbankan. Di bidang sistem pembayaran, transaksi tunai selama tw.II-2006 di Provinsi Kepulauan Riau mengalami *net outflow* sebesar Rp.249,45 miliar, sedangkan transaksi non-tunai melalui kegiatan kliring di wilayah kerja KBI Batam mencapai Rp.1,145 triliun (54.166 lembar).

3.2 MONETER

Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia serta prospek ekonomi moneter ke depan, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI Rate menjadi 12,25% atau turun 25 *basis poin* (bps) dari tingkat sebelumnya. Langkah yang dilakukan oleh otoritas moneter ini masih dalam kerangka upaya pencapaian sasaran inflasi ke depan yaitu $8\% \pm 1\%$ untuk tahun 2006. Hingga Juni 2006, kestabilan makroekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Salah satu indikatornya adalah kecenderungan inflasi yang terus menurun dan tekanan eksternal terhadap nilai tukar rupiah mulai mereda. Inflasi pada bulan Juni tercatat sebesar 0,45%. Dengan laju inflasi tersebut maka inflasi tahun kalender (Januari-Juni) mencapai 2,87% sedangkan inflasi *year on year* (Juni 2006 terhadap Juni 2005) adalah sebesar 11,68%. Berlanjutnya *trend* penurunan tekanan inflasi tersebut disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang secara rata-rata tetap stabil dan menguat, dampak *administered price* yang berkurang, serta kondisi permintaan domestik yang masih lemah.

Tabel 3.1
Perkembangan Uang Giral dan Kuasi di Wilker KBI Batam

(I=Rp 1 miliar)

Ket	2005				2006	
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II
Uang Giral	3.106,07	3.183,28	3.262,74	3.524,56	3.429,73	4.435,88
Giro	3.106,07	3.183,28	3.262,74	3.524,56	3.429,73	4.435,88
Uang Kuasi	4.700,43	4.937,68	5.111,04	5.182,59	5.122,77	6.104,83
Tabungan	3.084,28	3.132,15	3.040,04	3.013,30	2.819,91	3.089,24
Deposito	1.616,15	1.805,53	2.070,10	2.169,29	2.302,86	2.725,13
Total	7.806,50	8.120,96	8.373,78	8.707,15	8.552,49	10.450,71

Sumber : Bank Indonesia

Dana masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu jumlah uang kuasi pada tw.II-2006, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 691,61 miliar (13,50%) dibandingkan tw.I-2006. Peningkatan jumlah uang kuasi tersebut diiringi oleh peningkatan uang giral dimana sampai dengan tw.II-2006 meningkat sebesar 1,01 triliun (29,34%). Secara total jumlah uang giral dan uang kuasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar 1,70 triliun (19,85%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Suku bunga simpanan menunjukkan pergerakan yang cenderung meningkat. Untuk tw.II-2006 rata-rata suku bunga simpanan berjangka 3 bulan mencapai 10.25%, tingkat suku bunga tabungan sebesar 10.75%, dan tingkat suku bunga kredit modal kerja serta kredit investasi masing-masing sebesar 16.99% dan 17,40%. Perkembangan suku bunga perbankan di wilker KBI Batam dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perkembangan Suku Bunga (%)

(I=Rp 1 miliar)

Keterangan	2004			2005				2006	
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II
SBI 1 bulan	7,34	7,39	7,43	7,44	8,25	10	12,75	12,75	12,25
DPK *)									
Giro	10,75	9,25	14,6	14,72	6	6	6	6	6
Tabungan	9,88	10	9,6	8,88	14,71	9,33	10,63	10,69	10,75
Dep 3 bln	7,5	8,41	6,73	6,47	7,03	7,31	9,89	10,20	10,25
Kredit *)									
Modal Kerja	17,75	17,88	17,88	17,62	13,25	13,62	15,98	21,00	16,99
Investasi	17,75	18	18	17,53	13,71	14,76	16,64	19,20	17,40

Sumber : Bank Indonesia

*) Nilai rata-rata, yaitu: (nilai tertinggi+nilai terendah)/2

Berdasarkan tabel 3.2, atas dasar nilai rata-rata, terjadi peningkatan suku bunga simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan, sedangkan suku bunga giro tidak mengalami

perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun sebaliknya, suku bunga kredit justru mengalami penurunan. Hal ini sebagai respon dunia perbankan terhadap penurunan BI-rate.

3.3 PERBANKAN

Indikator-indikator perbankan di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tw.II-2006 menunjukkan peningkatan. Jumlah jaringan kantor Bank Umum meningkat dari 36 kantor pada tw.I-2006 menjadi 37 kantor pada triwulan laporan. Jaringan kantor bank umum yang baru tersebut didirikan di Tanjung Pinang, yang baru saja menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih tetap 10 (sepuluh) kantor. Selain itu, saat ini ada 4 (empat) BPR yang sedang dalam proses perijinan untuk pendiriannya.

Total *asset*, jumlah dana masyarakat yang dihimpun serta total kredit yang diberikan oleh perbankan menunjukkan *trend* peningkatan jika di banding tw.I-2006. Peningkatan total *asset* serta jumlah dana masyarakat yang dihimpun mengindikasikan kembalinya kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan. *Trend* peningkatan yang terjadi pada setiap triwulan ini menunjukkan masyarakat sudah mulai yakin untuk menyimpan dan menginvestasikan dananya di sektor perbankan. Setelah krisis yang terjadi tahun 1998, masyarakat berangsur-angsur kembali memberikan kepercayaan kepada perbankan untuk mengelola dana mereka. Kepercayaan masyarakat ini diperkuat dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan menjamin keamanan dana yang mereka simpan di perbankan.

Tabel 3.3
Perkembangan Indikator Perbankan di Wilker KBI Batam

(1= 1 juta rupiah)

Indikator	Periode						
	2004	2005				2006	
		Tw. I	Tw.II	Tw. III	Tw. IV	Tw.I	Tw.II
1. Jaringan BU	32	34	33	33	33	36	37
a. Batam	21	23	23	23	23	24	24
b. Tj. Pinang	7	7	7	7	7	9	10
c. Karimun	3	3	2	2	2	2	2
d. Natuna	1	1	1	1	1	1	1
2. Jaringan BPR	4	5	8	9	10	10	10
a. Batam	3	4	6	6	7	7	7
b. Tj. Pinang	-	-	1	2	2	2	2
c. Karimun	1	1	1	1	1	1	1
d. Natuna	-	-	-	-	-	-	-
3. Total Asset	9.427.598	9.316.232	9.715.095	10.213.912	10.666.450	10.559.530	12.513.637
a. Batam	6.703.118	7.077.782	7.601.663	8.022.161	8.188.109	8.160.702	9.451.161
b. Tj. Pinang	1.749.929	1.718.356	1.718.891	1.768.540	1.950.983	1.907.064	2.256.922
c. Karimun	442.855	406.736	267.007	271.785	311.01	281.865	350.117
d. Natuna & Tj.	104.6	113.358	127.534	151.426	216.348	209.899	455.437

Indikator	Periode						
	2004	2005				2006	
		Tw. I	Tw.II	Tw. III	Tw. IV	Tw.I	Tw.II
Uban							
4. Total DPK	7.721.045	7.806.495	8.120.960	8.373.778	8.707.149	8.552.495	10.543.535
a. Batam	5.458.347	5.599.666	6.049.847	6.224.301	6.269.948	6.178.643	7.474.775
b. Tj.Pinang	1.724.321	1.692.427	1.678.209	1.728.343	1.916.705	1.884.600	2.263.249
c. Karimun	437.779	400.665	263.969	268.182	306.791	279.067	346.106
d. Natuna	100.598	113.737	128.935	152.952	213.705	210.185	459.207
5. Total Kredit	4.397.899	4.761.130	5.104.373	5.685.474	5.877.399	5.771.562	6.283.823
a. Batam	3.763.287	4.121.633	4.465.106	4.988.122	5.138.278	5.029.911	5.456.206
b. Tj.Pinang	498.143	501.424	521.712	571.737	607.85	604.457	666.113
c. Karimun	120.798	120.94	97.217	102.511	108.393	111.945	128.983
d. Natuna	15.671	17.133	20.338	23.104	22.878	25.249	32.521
6. LDR	56,96%	60,99%	62,85%	63,68%	67,50%	67,48%	59,69%
a. Batam	68,95%	73,60%	73,81%	74,90%	81,95%	81,41%	64,53%
b. Tj.Pinang	28,89%	29,63%	31,09%	30,63%	31,71%	32,07%	47,38%
c. Karimun	27,59%	30,18%	36,83%	38,25%	35,33%	40,11%	88,23%
d. Natuna	15,58%	15,06%	15,77%	16,49%	10,71%	12,01%	7,08%
7. NPL's	2,67%	2,72%	4,12%	4,56%	6,01%	4,27%	5,43%
a. Batam	2,84%	2,85%	4,43%	3,80%	5,17%	3,14%	2,01%
b. Tj. Pinang	1,94%	2,13%	2,24%	12,09%	14,28%	14,65%	9,11%
c. Karimun	0,81%	0,86%	0,99%	1,21%	0,69%	0,19%	4,18%
d. Natuna	0,15%	0,14%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : Bank Indonesia

Bank-bank di wilayah kerja KBI Batam lebih mampu menyerap dana dari masyarakat dibandingkan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Fungsi intermediasi perbankan di Provinsi Kepulauan Riau masih belum optimal. Meskipun jumlah kredit yang diberikan oleh perbankan meningkat, namun tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada triwulan laporan justru mengalami *trend* penurunan sebesar 11,54% dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peningkatan total kredit lebih kecil daripada peningkatan total dana masyarakat yang berhasil dihimpun. Keengganan dunia perbankan menyalurkan kredit ini akan berpengaruh pada pertumbuhan dunia usaha, terutama yang pendanaannya berasal dari perbankan.

Non Performing Loan (NPL) di wilayah kerja KBI Batam meningkat dari 4,27% pada tw.I-2006 menjadi 5,43% pada triwulan laporan. Peningkatan NPL yang terjadi di Tanjung Balai Karimun memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan nilai NPL di Provinsi Kepulauan Riau. Dari nilai 0,19% pada tw.I-2006, NPL di Tanjung Balai Karimun tersebut meningkat menjadi 4,18%. Di sisi yang lain, Kota Batam dan Tanjung Pinang justru menunjukkan *trend* penurunan nilai NPL, dimana untuk Kota Batam terdapat penurunan dari 3,14% (tw.I-2006) menjadi 2,01% (tw.II-2006). Sementara itu nilai NPL di Tanjung Pinang menunjukkan *trend* penurunan meski dalam besaran yang masih tinggi. Pada tw.I-2006, nilai NPL di Tanjung Pinang sebesar 14,65%, dan pada triwulan laporan turun menjadi 9,11%.

Peningkatan total nilai NPL di wilayah kerja KBI Batam ini menunjukkan performa dunia usaha yang masih belum optimal. UMKM sebagai salah satu target pemberian kredit

perlu dikembangkan agar dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Oleh karena itu KBI Batam sebagai otoritas moneter telah melakukan rapat koordinasi dengan dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). untuk wilayah kerja KBI Batam telah diadakan rapat koordinasi dengan UMKM sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 20 Februari 2006, 17 Maret 2006, 4 Mei 2006, 16-18 Mei 2006, dan 19 Mei 2006.

BOKS - VII **UKM Berpeluang Manfaatkan Batam**

Kalangan pengusaha kecil dan menengah berpeluang memanfaatkan Batam sebagai basis pemasaran produk sekaligus untuk meningkatkan ekspor ke Malaysia dan Singapura.

Kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Jon Arizal mengatakan peningkatan ekspor perlu dibangun jaringan antarlembaga di dalam negeri maupun di luar negeri, serta peningkatan inovasi dan kualitas produk. "UKM juga harus selalu berinovasi agar produknya bisa laku di pasar. Peluangnya sangat terbuka," kata dia di sela-sela pembukaan Batam Expo VI selama 4-8 Mei, kemarin.

Batam Expo merupakan agenda tahunan yang menampilkan 140 stan pameran produk UKM dari 14 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini dikunjungi banyak masyarakat Singapura dan Malaysia karena agenda itu tercatat di beberapa agen perjalanan wisata di kedua negara itu.

Terkait dengan pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar mengingat sektor UMKM merupakan sektor yang memiliki potensi cukup besar dan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, KBI Batam terus berupaya mendorong perbankan serta instansi daerah untuk meningkatkan sektor UMKM tersebut. Diharapkan agar pemerintah daerah menyusun suatu rencana kongkrit serta kerjasama dengan sentra-sentra UMKM di wilayah Provinsi Kepri.

(sumber: Bisnis Indonesia, 5 Mei 2006)

Secara geografis, dana simpanan yang masuk ke dunia perbankan di wilayah kerja KBI Batam porsi terbesar berasal dari kota Batam sebesar 7,47 triliun atau 70,89% dari seluruh dana masyarakat yang berhasil dihimpun di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian pula kredit yang disalurkan oleh perbankan sebagian besar mengalir ke kota Batam sebesar 5,46 triliun atau 86,94% dari seluruh total kredit yang disalurkan ke masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

3.3.1 Perkembangan Total Asset Bank Umum

Total *asset* bank umum yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam mengalami peningkatan. Sampai dengan tw.II-2006, total *asset* bank umum mencapai Rp.12,51 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 18,51% dibanding tw.I-2005 yang tercatat sebesar Rp. 10,56 triliun.

Komposisi total *asset* perbankan di wilayah kerja KBI Batam masih didominasi oleh kelompok Bank Swasta, dimana kelompok bank ini memiliki total *asset* sebanyak Rp.6,25 triliun atau 51,36% dari seluruh *asset* perbankan di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu kelompok Bank Pemerintah mengumpulkan *asset* sebanyak Rp.4,68 triliun atau sama dengan

38,46% dari seluruh *asset* perbankan di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) mempunyai *asset* sebesar Rp.1,24 triliun (10,19%).

Namun jika dilihat dari *trend* pertumbuhan, BPD Riau menunjukkan kinerja paling baik. BPD Riau berhasil menaikkan total *asset* yang dimilikinya sebesar 428 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya. Artinya total *asset* BPD Riau mengalami peningkatan sebesar 52,71%. Kenaikan total *asset* tersebut kemudian diikuti oleh kelompok Bank Swasta yang sebesar 16,49% dan kelompok Bank Pemerintah sebesar 6,86%.

Meskipun ibukota Provinsi Kepulauan Riau telah pindah ke Tanjung Pinang, namun kegiatan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam. Oleh karena itu jumlah total *asset* perbankan masih tetap terhimpun di Kota Batam. Total *asset* perbankan yang ada di Kota Batam pada tw.II-2006 sebesar 9,45 triliun atau 76% dari seluruh total *asset* perbankan di Kepulauan Riau. Sedangkan total *asset* yang berhasil dihimpun oleh perbankan di Tanjung Pinang sebesar 2,26 triliun atau 18% dari seluruh total *asset* perbankan di Kepulauan Riau. Sementara itu total *asset* perbankan di wilayah Kepulauan Riau (Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, dan Natuna) sebesar 805 miliar (6,43%).

Tabel 3.4
Perkembangan Total Asset Perbankan di Wilker KBI Batam

(1= Rp 1 miliar)

Lokasi	2004			2005				2006		Pertumb (%)	
	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	q-t-q	y-o-y
Kota Batam	5.574	6.142	6.703	7.078	7.602	8.022	8.188	8.161	9.451	16	31
Wil.Tj.Pinang	1.672	1.624	1.75	1.718	1.719	1.769	1.951	1.907	2.256	18	24
Kepln Riau*)	540	497	547	520	395	423	527	491	805	64	104
Total	7.787	8.263	9	9.316	9.716	10.214	10.666	10.559	12.513	19	29
Nasional (triliun Rp)	1.152	1.171	1.215	1.224	1.279	1.357	1.47	1.465		3,97	19,77

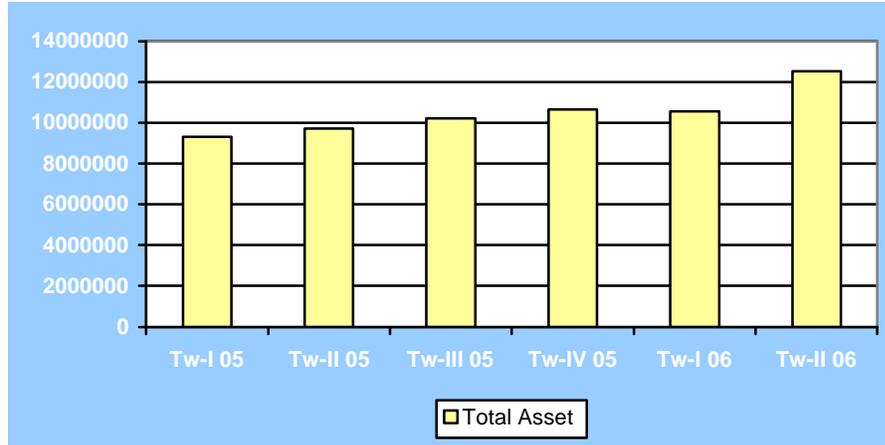
Sumber : Bank Indonesia

*) wilayah Kepulauan Riau meliputi Tj.Uban, Kab. Tanjung Balai Karimun dan Kab. Natuna

Namun peningkatan total *asset* terbesar triwulanan (q-t-q) justru terjadi di wilayah Kepulauan Riau sebesar 64%, kemudian diikuti Tanjung Pinang (18%) dan Kota Batam (16%). Demikian pula total *asset* secara tahunan (y-o-y), peningkatan terbesar kembali terjadi di Kepulauan Riau sebesar 104% atau lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu total *asset* perbankan di Tanjung Pinang mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 31% dari tahun sebelumnya. Peningkatan total *asset* tersebut diikuti oleh Kota Batam sebesar 24%. Satu hal yang menarik adalah pada triwulan sebelumnya total *asset* perbankan di wilayah Kepulauan Riau mengalami penurunan baik secara triwulanan maupun secara tahunan. Meningkatnya total *asset* perbankan di wilayah Kepulauan Riau yang cukup dramatis ini menunjukkan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan di wilayah

Kepulauan Riau. Peningkatan total *asset* perbankan di kepulauan Riau itu dapat juga merupakan titik balik dari kebangkitan kinerja perbankan di daerah tersebut.

Grafik 3.1
Grafik Perkembangan Total Asset Bank Umum di Wilker KBI Batam



Sumber : Bank Indonesia

3.3.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum

Penghimpunan dana masyarakat pada bank umum selama tw.II-2006 kembali membaik setelah sempat menurun pada triwulan sebelumnya. Penghimpunan dana masyarakat pada bank umum selama triwulan laporan mencapai Rp.10,54 triliun atau meningkat sebesar Rp.1,99 triliun (23,28%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan penghimpunan dana bank umum dapat mengindikasikan adanya ketertarikan masyarakat di wilayah kerja KBI Batam untuk berinvestasi di sektor perbankan. Faktor suku bunga yang masih tinggi merupakan daya tarik bagi investor untuk menyimpan dananya di sektor perbankan.

Lebih dari separuh masyarakat di wilayah kerja KBI Batam memilih menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro atau tabungan. Hal ini ditunjukkan dari total dana masyarakat yang ada pada bank umum, sebagian besar berbentuk giro Rp.4,44 triliun atau 43,28% dari total dana simpanan, tabungan sebesar 3,09 triliun (30,14%), dan deposito 2,73 triliun (26,59%). Preferensi masyarakat terhadap giro dan tabungan tersebut antara lain dipengaruhi oleh sektor ekonomi industri dan perdagangan yang masih menjadi sektor utama di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan dana yang mudah dicairkan untuk kepentingan transaksi ekonomi.

Preferensi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau terhadap giro masih tetap tinggi. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan simpanan jenis giro yang terus meningkat. Simpanan jenis giro menunjukkan *trend* peningkatan terbesar yaitu 28,60%. Peningkatan itu diikuti oleh simpanan jenis deposito sebesar 18,34% dan simpanan jenis tabungan sebesar 9,55%. Untuk

trend perkembangan dana yang dapat dihimpun oleh bank umum yang berada di wilayah kerja KBI Batam dari tw.I-2005 sampai dengan tw.II-2006 dapat dilihat tabel 3.5.

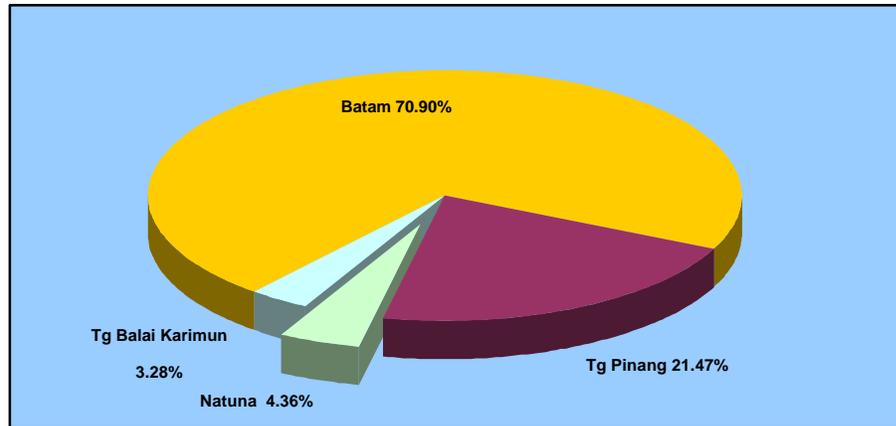
Tabel 3.5
Penghimpunan Dana Bank Umum di Wilker KBI Batam

Keterangan	2005				2006	
	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	TW.1	TW.2
Jenis Simpanan:	7,806,495	8,120,960	8,373,778	8,707,149	8,552,495	10,250,252
- Giro	3,106,069	3,183,277	3,262,739	3,524,558	3,429,726	4,435,878
- Tabungan	3,084,279	3,132,152	3,040,044	3,013,300	2,819,911	3,089,243
- Deposito Berjangka	1,616,147	1,805,531	2,070,995	2,169,291	2,302,858	2,725,131
Jenis Bank:						
Bank Pemerintah	2,908,186	3,039,967	3,032,576	3,217,522	3,191,790	3,595,272
- Giro	861,001	869,819	851,339	1,011,615	997,127	1,220,980
- Tabungan	1,478,146	1,536,402	1,487,591	1,494,184	1,423,278	1,540,704
- Deposito Berjangka	569,039	633,746	693,646	711,723	771,385	833,588
BPD Riau	505,002	573,855	669,662	854,888	809,241	1,263,075
- Giro	346,156	414,541	511,997	627,222	572,038	986,016
- Tabungan	126,946	126,437	124,294	190,101	127,317	135,654
- Deposito Berjangka	31,900	32,877	33,371	37,565	109,886	141,405
Bank Swasta	4,393,307	4,507,138	4,671,540	4,634,739	4,551,464	5,391,905
- Giro	1,898,912	1,898,917	1,899,403	1,885,721	1,860,561	2,228,882
- Tabungan	1,479,187	1,469,313	1,428,159	1,329,015	1,269,316	1,412,885
- Deposito Berjangka	1,015,208	1,138,908	1,343,978	1,420,003	1,421,587	1,750,138

Sumber : Bank Indonesia Batam

Kelompok Bank Swasta masih mendominasi peta perbankan di wilayah kerja KBI Batam dalam hal penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Swasta sebesar 5,39 triliun atau 52,59% dari total DPK di wilayah kerja KBI Batam. DPK yang berhasil dihimpun oleh kelompok Bank Swasta ini juga masih menunjukkan peningkatan yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok Bank Pemerintah. Peningkatan penghimpunan dana masyarakat oleh kelompok Bank Swasta sebesar 18%, sementara kelompok Bank Pemerintah meningkat sebesar 10%. Sedangkan dari segi geografis kota Batam masih tetap sebagai kontributor terbesar dari penghimpunan DPK yaitu sebesar 9,45 triliun (70,90%), diikuti oleh Tanjung Pinang sebesar 2,26 triliun (21,47%), Natuna 459 miliar (4,36%) dan Tanjung Balai Karimun sebesar 346 miliar (3,28%).

Grafik 3.2.
Perkembangan Total DPK Bank Umum di Wilker KBI Batam Triwulan II-2006



Sumber : Bank Indonesia

3.3.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum

Jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam sampai dengan tw.II-2006 meningkat. Jumlah penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank umum tersebut mencapai Rp.6,12 triliun. Jika dibandingkan dengan tw.I-2006, jumlah itu meningkat sebesar Rp.346,7 miliar (6,01%). Peningkatan kredit terbesar terdapat pada kelompok bank swasta sebesar Rp.270 miliar (10,26%). Penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Pemerintah meningkat sebesar Rp.32,8 miliar (1,15%). Demikian pula penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPD juga meningkat sebesar Rp.43,87 miliar (15,90%). Namun peningkatan penyaluran kredit oleh bank umum tersebut (6,01%) masih lebih kecil jika dibandingkan dengan peningkatan DPK yang berhasil dihimpun oleh bank umum (20%) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu LDR bank umum di wilayah Kepulauan Riau menunjukkan trend penurunan.

Tabel 3.6
Perkembangan Outstanding Kredit Bank Umum di Wilker KBI Batam

(1=Rp miliar)

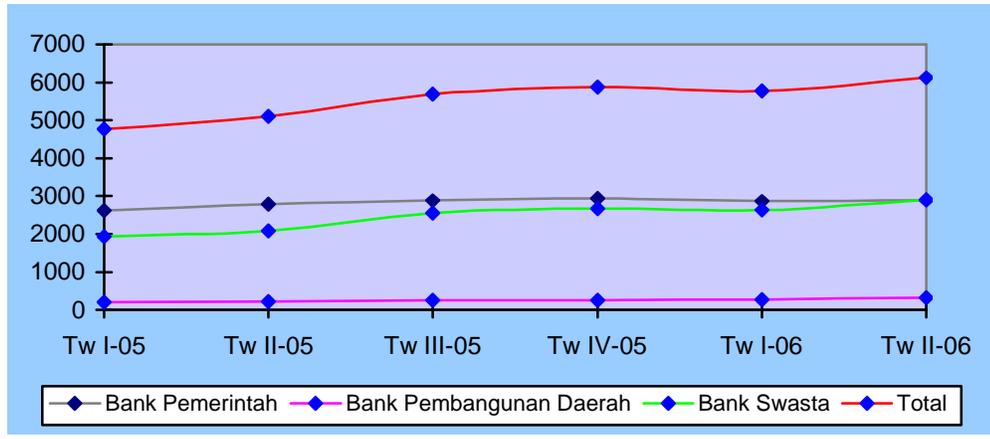
	2005				2006		PERT
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	
TOTAL	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262	6.01%
- Bank Pemerintah*)	2,624,076	2,786,000	2,882,993	2,946,905	2,863,854	2,896,660	1.15%
- BPD	208,175	228,255	249,366	255,967	275,835	319,704	15.90%
- Bank Swasta	1,928,879	2,090,118	2,553,115	2,674,527	2,631,873	2,901,898	10.26%

Sumber : Bank Indonesia

*) termasuk BPD Riau

Tingkat penyaluran kredit yang relatif lebih kecil dari peningkatan DPK tersebut masih perlu didorong agar bank umum dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk pergerakan outstanding kredit bank umum dapat dilihat pada grafik 3.3

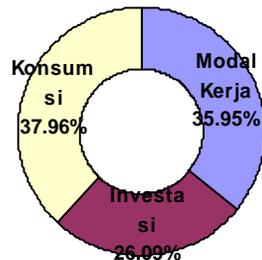
Grafik 3.3
Perkembangan Outstanding Kredit Bank Umum di Wilker KBI Batam



Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang disalurkan di wilayah kerja KBI Batam sebagian besar digunakan untuk kredit konsumsi sebesar Rp.2,32 triliun atau 37,96% dari total kredit yang diberikan. Sedangkan kredit untuk modal kerja dan investasi masing-masing sebesar Rp.2,20 triliun (35,95%) dan Rp.1,60 triliun (26,09%). Untuk komposisi penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan, dapat dilihat pada grafik 3.4.

Grafik 3.4
Komposisi Penyaluran Kredit di Wilker KBI Batam Triwulan I-2006



Dari segi pertumbuhan, peningkatan jumlah kredit terbesar pada tw.II-2006 juga dialami oleh kredit untuk jenis konsumsi. Kredit untuk jenis konsumsi ini meningkat sebesar Rp.143 miliar atau 6,57% dari tw.I-2006. Sementara itu kredit untuk modal kerja dan investasi masing-masing sebesar Rp.118 miliar (5,69%) dan Rp.85 miliar (2,63%). Peningkatan pembiayaan kredit untuk modal kerja dan investasi yang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kredit

untuk konsumsi ini menunjukkan dunia perbankan masih belum optimal dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha.

Tabel 3.7
Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum di Wilayah Kerja KBI Batam pada
Triwulan II-2006

(I= Rp 1 miliar)

NO	KETERANGAN	2005				2006	
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
1	Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan:	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262
	- Modal kerja	1,803,592	1,848,852	1,962,136	2,137,919	2,081,520	2,199,868
	- Investasi	1,359,514	1,433,060	1,712,592	1,637,894	1,511,012	1,596,120
	- Konsumsi	1,598,024	1,822,461	2,010,746	2,101,586	2,179,030	2,322,274
2	Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi:	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262
	- Pertanian	120,228	129,475	130,138	148,299	150,171	151,213
	- Pertambangan	43,474	42,258	51,099	59,329	46,681	53,657
	- Industri	847,348	811,029	1,058,739	1,024,812	909,123	893,615
	- Listrik, gas dan air	131	322	2,402	2,238	4,067	4,422
	- Konstruksi	543,896	573,415	630,556	579,345	548,264	589,123
	- Perdagangan	1,133,026	1,222,608	1,279,157	1,332,411	1,304,544	1,384,811
	- Pengangkutan	61,014	60,511	77,735	99,132	94,345	134,863
	- Jasa dunia usaha	338,443	353,305	366,738	450,586	473,365	517,172
	- Jasa sosial	69,322	80,537	71,855	74,795	58,011	63,490
	- Lainnya	1,604,248	1,830,913	2,017,055	2,106,452	2,182,991	2,325,896

Sumber : Bank Indonesia

Penyaluran kredit di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar digunakan untuk konsumsi, demikian pula dilihat dari segi tingkat pertumbuhan. Data ini dapat mencerminkan bahwa kegiatan dunia usaha yang dibiayai oleh perbankan masih belum optimal. Sebagian besar DPK yang masuk ke dunia perbankan disalurkan kembali ke masyarakat untuk keperluan konsumsi. Salah satu sebab besarnya jumlah kredit untuk konsumsi ini adalah karena perbankan menilai penyaluran kredit untuk konsumsi relatif lebih aman dari potensi macet. Pada tw.II-2006, suku bunga kredit konsumsi (15,62%) lebih rendah daripada kredit modal kerja (16,99%) maupun kredit investasi (17,40%).

Kredit yang disalurkan di luar konsumsi sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan. Kredit yang disalurkan untuk sektor perdagangan ini selalu mendapatkan porsi terbesar dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lain pada setiap triwulan. Demikian pula pada tw.II-2006, sektor perdagangan mendapatkan dana dari perbankan dalam bentuk kredit sebesar Rp.1,38 triliun atau 36,48% dari seluruh total kredit di luar konsumsi. Besarnya porsi

kredit untuk sektor perdagangan ini dapat mencerminkan bahwa sektor perdagangan adalah sektor yang lebih berkembang dibanding dengan sektor yang lain.

Tabel 3.8
Perkembangan Kolektibilitas Kredit Bank Umum di Wilayah Kerja KBI

KETERANGAN	2005				2006	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Total	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262
- Lancar	4,267,390	4,288,212	4,615,820	4,844,373	4,650,364	4,957,027
- Dalam Perhatian Khusus	364,458	605,892	776,895	680,053	789,573	801,847
- Kurang Lancar	21,268	46,585	63,022	86,674	22,604	43,229
- Diragukan	54,412	33,562	79,628	23,721	52,004	40,739
- Macet	53,602	130,122	150,109	242,578	257,017	275,420
>> NPL (Nominal)	129,282	210,269	292,759	352,973	331,625	359,388
>> NPL (%)	2.72%	4.12%	5.15%	6.01%	5.75%	5.87%

Sumber : Bank Indonesia

Adanya industri dan perusahaan-perusahaan asing yang melakukan produksi di Provinsi Kepulauan Riau menyerap tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Mobilisasi tenaga kerja dari luar daerah tersebut menciptakan pangsa pasar baru di Provinsi Kepulauan Riau. Adanya pangsa pasar baru tersebut menjadikan sektor perdagangan sebagai salah satu sektor yang paling berkembang di Provinsi Kepulauan Riau. Sektor-sektor lain yang juga mendapatkan pembiayaan cukup besar dari perbankan adalah industri sebesar Rp.894 miliar (23,54%) dan Rp.589 miliar (15,52%).

NPL bank umum di Provinsi Kepulauan Riau pada tw.II-2006 meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika pada tw.I-2006 NPL bank umum sebesar 5,75%, maka pada triwulan laporan NPL bank umum meningkat menjadi 5,87%. Secara nominal NPL bank umum meningkat sebesar Rp.27 miliar dibanding triwulan sebelumnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan NPL di bank umum adalah kinerja dunia usaha yang belum optimal. Kinerja dunia usaha di sektor riil tersebut perlu didorong untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi Kepulauan Riau. KBI Batam telah melakukan upaya untuk mendorong kinerja dunia usaha dengan memberikan Bantuan Teknis (Bantek) kepada dunia usaha khususnya UMKM yang berada di wilayah kerja KBI Batam. Bantuan teknis yang dilakukan oleh KBI Batam tersebut dilaksanakan pada 20 Juni 2006.

3.3.4 Perkembangan BPR

Total *asset* BPR yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam mengalami peningkatan. Sampai dengan tw.II-2006, total *asset* BPR mencapai Rp.340,14 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp.52,69 miliar (18,33%) dibanding tw.I-2005 yang tercatat sebesar Rp. 287,45 miliar.

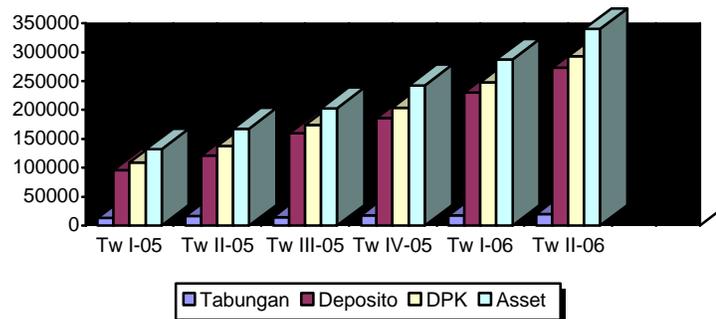
Tabel 3.9
Perkembangan Kinerja BPR di Wilayah Kerja KBI Batam
dalam jutaan rupiah

KETERANGAN	2005				2006	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II
1. TOTAL ASSET	131,648	167,946	203,213	243,143	287,447	340,141
2. TOTAL DANA	109,278	137,669	174,307	204,361	248,163	293,085
a. Tabungan	13,398	16,211	14,758	18,074	17,391	20,018
b. Deposito	95,880	121,458	159,548	186,287	230,772	273,067

sumber: Bank Indonesia

Total dana yang berhasil dihimpun oleh BPR di wilayah kerja KBI Batam pada tw.II-2006 meningkat. Jika pada tw.I-2006 total yang berhasil dihimpun oleh BPR di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.248 miliar, maka pada triwulan laporan dana masyarakat tersebut meningkat menjadi Rp.293, naik sebesar Rp.45 miliar (18,10%). Sebagian besar dana masyarakat yang dihimpun oleh BPR disimpan dalam bentuk deposito yaitu sebesar Rp.273 miliar atau 93% dari seluruh total DPK BPR. Sedangkan 7% sisanya disimpan dalam bentuk tabungan sebesar Rp.20 miliar. Suku bunga deposito BPR yang tinggi menjadi salah satu alasan kuat mengapa masyarakat lebih suka menyimpan dananya dalam bentuk deposito ketimbang tabungan. Selisih suku bunga deposito dan suku bunga tabungan relatif cukup besar. Bunga deposito berjangka BPR rata-rata sebesar 6,5%, sementara suku bunga tabungan rata-rata 4%.

Grafik 3.5
Perkembangan Asset dan Dana Pihak Ketiga BPR di Wilker KBI Batam



Seperti halnya yang terjadi di bank umum, BPR di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga lebih dapat menghimpun dana dari masyarakat ketimbang menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Baik dari segi jumlah maupun tingkat pertumbuhan, penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR masih lebih kecil jika dibandingkan dengan penghimpunan dana yang dilakukan oleh BPR.

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR kepada masyarakat meningkat jika dibandingkan dengan triwulan I-2006. Jumlah kredit yang diberikan pada tw.II-2006 sebesar Rp.165 miliar meningkat sebesar Rp.24 miliar (17,37%) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.141 miliar. Peningkatan penyaluran kredit oleh BPR juga dibarengi dengan peningkatan NPL. Jika pada tw.I-2006 NPL BPR di Provinsi Kepulauan Riau adalah 0,90% maka pada tw.II-2006, nilai tersebut naik menjadi 1,17%.

Tabel 3.10
Perkembangan Kolektibilitas Kredit BPR di Wilayah Kerja KBI Batam

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2005				2006	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II
Total Kredit	72,408	86,433	100,312	118,456	141,064	165,561
a. Lancar	72,320	85,805	99,919	117,796	139,800	163,620
b. Kurang Lancar	40	611	303	484	1,149	1,157
c. Di ragukan	16	8	28	-	45	385
d. Macet	32	9	62	176	70	399

sumber: Bank Indonesia

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan konsumsi. Kredit untuk konsumsi yang disalurkan BPR di wilayah kerja KBI Batam pada tw.II-2006 sebesar Rp.81,9 miliar atau 49,45% dari seluruh total kredit yang diberikan oleh BPR. Sementara kredit untuk modal kerja yang diberikan BPR di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.50,1 miliar atau 30,28% dari seluruh total kredit yang diberikan oleh BPR. Sedangkan untuk kredit investasi dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masing-masing sebesar Rp.20,1 miliar (12,12%) dan Rp.13,5 miliar (8,15%). Besarnya kredit BPR untuk keperluan konsumsi mencerminkan intermediasi yang dilakukan BPR terhadap dunia usaha masih belum optimal. Seperti halnya bank umum, BPR masih lebih merasa aman memberikan kredit di sektor konsumsi.

Tabel 3.11
Perkembangan Kredit BPR Menurut Jenis Penggunaannya di Wilayah Kerja KBI
Batam pada triwulan II-2006

dalam jutaan rupiah

KETERANGAN	2005				2006	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II
Total Kredit	72,408	86,433	100,312	118,456	141,064	165,561
a. Investasi	14,178	15,454	15,373	16,584	17,830	20,073
b. Modal Kerja	10,911	18,071	26,863	34,643	41,294	50,126
c. Kosumsi	46,266	52,032	56,914	66,282	71,859	81,870
d. KPR	1,053	876	1,163	947	10,081	13,492

sumber: Bank Indonesia

Namun dari sisi pertumbuhan, kredit untuk KPR pada tw.II-2006 mengalami peningkatan yang paling tinggi, sebesar 33,28%. Peningkatan tertinggi kedua dialami oleh kredit untuk modal kerja sebesar 21,39%. Untuk kredit konsumsi dan investasi meningkat masing-masing sebesar 13,93% dan 12,58%. Peningkatan di kredit untuk KPR ini menunjukkan adanya pergeseran pembiayaan yang dilakukan oleh BPR. Banyaknya proyek dan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam menyebabkan permintaan kredit untuk KPR meningkat.

Pada tw.II-2006, kredit yang diberikan untuk sektor ekonomi di luar kepentingan konsumsi masih didominasi kredit untuk sektor perdagangan. Kredit yang diberikan oleh BPR di wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk sektor ini tercatat sejumlah Rp.35,58 miliar atau 37,31% dari total kredit untuk sektor ekonomi di luar konsumsi. Kemudian kredit untuk sektor jasa-jasa tercatat sebesar Rp.14,82 miliar atau 15,54% dari seluruh kredit yang diberikan untuk

sektor ekonomi di luar konsumsi. Sedangkan sektor perindustrian dan pertanian masing-masing sejumlah Rp.584 juta (0,61%) dan Rp.252 juta (0,26%). Besarnya porsi kredit untuk sektor perdagangan menunjukkan industri ini masih merupakan sektor yang cukup berkembang di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam.

Tabel 3.12
Perkembangan Sektor Ekonomi yang Memperoleh Pembiayaan dari BPR di Wilayah Kerja KBI Batam pada Triwulan II-2006

dalam jutaan rupiah

KETERANGAN	2005				2006	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II
SEKTOR EKONOMI	72,408	86,433	100,312	118,456	141,064	165,561
a. Pertanian	80	151	141	262	252	252
b. Perindustrian	11	208	164	185	633	584
c. Perdagangan	21,795	29,151	31,829	35,700	35,067	35,577
d. Jasa - Jasa	4,155	4,401	6,247	5,793	7,108	14,823
e. Lainnya	46,367	52,522	61,931	76,516	98,004	114,325

sumber: Bank Indonesia

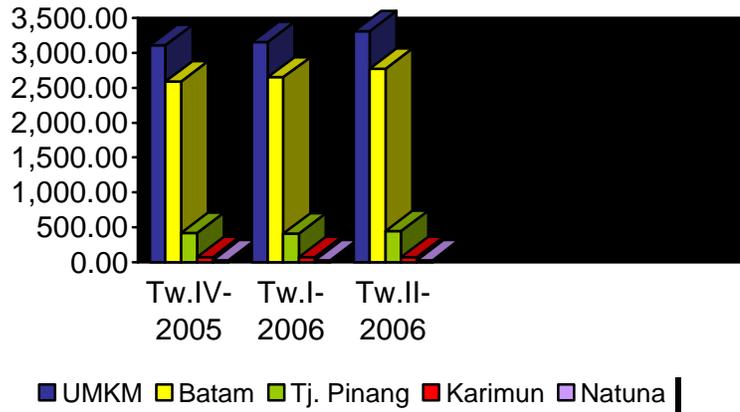
Kredit yang diberikan kepada sektor ekonomi di luar konsumsi meningkat sebesar Rp.11,1 miliar atau 18,73% dibandingkan dengan tw.I-2006. Peningkatan paling tinggi pada tw.II-2006 dialami oleh kredit untuk sektor ekonomi jasa-jasa yang meningkat 108,54% dari triwulan sebelumnya. Peningkatan penyaluran kredit juga terjadi di sektor perdagangan sebesar Rp.510 juta atau 1,45% dari triwulan sebelumnya. Sebaliknya sektor perindustrian justru mengalami penurunan kredit sebesar Rp.49 juta atau turun 7,74%. Sedangkan sektor pertanian mengalami stagnasi jika dibandingkan dengan tw.I-2006. Pada tw.I-2006 dan tw.II-2006 kredit yang diberikan BPR untuk sektor pertanian tercatat sebesar Rp.252 juta. Bahkan jika dihitung secara tahunan (y-t-d) kredit untuk sektor ini justru mengalami penurunan. Pada posisi akhir tahun 2005, kredit yang diberikan BPR kepada sektor ekonomi tercatat Rp.262 juta. Artinya jika dibandingkan dengan tahun lalu, kredit untuk sektor ini pada tw.II-2006 turun 3,82%.

3.3.5 Perkembangan Kredit UMKM

Dalam rangka mendorong upaya pengembangan UMKM, Bank Indonesia secara aktif mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan UMKM antara lain melalui pembentukan satgas KKMB. Selain itu, dalam upaya pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia Batam menyelenggarakan beberapa kegiatan, seperti Bantuan Teknis UMKM dan Rapat Koordinasi

UMKM. Disamping itu, Bank Indonesia Batam juga turut serta dalam upaya untuk mendukung kegiatan Bazaar Intermediasi UMKM.

Grafik 3.6
Perkembangan Kredit Kepada UMKM di Wilker KBI Batam



Secara nasional, Bank Indonesia juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan sektor UMKM, diantaranya adalah pendirian lembaga riset perbankan daerah (LRPD) dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan KKMB di bidang kelautan dan perikanan antara BI dengan Departemen Kelautan & Perikanan.¹⁸

BOKS VIII
MENDORONG PENJAMINAN KREDIT, KECIL & MIKRO
SERTA PENDIRIAN LEMBAGA RISET PERBANKAN DAERAH
(LRPD)

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Maman H. Somantri menyaksikan penandatanganan kerjasama perjanjian penjaminan kredit antara Pemerintah Daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan PT. Askrindo, di Jakarta. Sebagai implementasi pilar-I Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu menciptakan struktur perbankan yang sehat, kerjasama ini sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK). “Program penjaminan ini diharapkan dapat meningkatkan akses kredit perbankan bagi UMK yang dinilai *feasible* namun karena berbagai keterbatasan dinilai tidak *bankable*”, demikian tambah Maman H. Somantri.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia bersama Universitas Hasanuddin – Makassar dan Universitas Andalas – Padang menandatangani MoU dalam rangka pendirian Lembaga Riset Perbankan Daerah (LRPD). Sebagai bentuk implementasi pilar-II API yaitu menciptakan sistem pengaturan yang efektif, kerjasama ini ditandatangani oleh Maman H. Somantri dengan Pembantu

¹⁸ Uraian selengkapnya dapat dilihat di Boks VIII dan IX

Rektor-II Universitas Andalas – Dr. Werry Dartta Taifur, SE, MA dan Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin – Dr. Dwia Aries Tina, MA.

Lembaga Riset Perbankan Daerah diharapkan memiliki beberapa karakter yang khas, yaitu : independen, kredibel dan proaktif dalam melakukan penelitian. Hal ini menjadi visi lembaga ini dan harus menjadi pedoman bagi semua yang terlibat dalam pendirian dan operasional lembaga tersebut. Riset yang dihasilkan diharapkan bersifat *demand driven* dan *up to date*, artinya penelitian tersebut adalah penelitian yang memang menjadi kebutuhan industri perbankan pada saat itu, yang hasilnya dapat diterapkan secara nyata.

Hingga saat ini, kerjasama dalam rangka penjaminan kredit telah dilakukan oleh 27 pemerintah Kabupaten/Kota di 11 propinsi. Sementara itu, kerjasama pembentukan LRPD oleh BI telah dilakukan dengan 4 universitas, yaitu: Universitas Brawijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Andalas.

Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, saat ini belum terdapat wacana pembentukan LRPD serta kerjasama penjaminan kredit. Namun demikian, BI Batam tetap *concern* terhadap sektor UMKM. diharapkan pembentukan KKMB yang saat ini sedang dalam tahap pendirian dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap perkembangan sektor UMKM khususnya di Kepulauan Riau.

Dikutip dari <http://www.bi.go.id>

Untuk wilayah kerja KBI Batam, dilihat dari sisi pendanaan, penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Provinsi Kepulauan Riau pada tw.II-2006 tercatat sebesar Rp.2,83 triliun, dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

BOKS XI

BANK INDONESIA DAN DEPARTEMEN KELAUTAN & PERIKANAN BEKERJASAMA BERDAYAKAN KKMB DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Deputi Gubernur Bank Indonesia – Siti Ch. Fadrijah dan Direktur Jenderal Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan & Perikanan – Martani Husaini, menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka Pelatihan Konsultan Keuangan/Pendampingan UMKM Mitra Bank (KKMB) dan Penyusunan Buku Pola Pembiayaan Komoditi Unggulan Sektor Kelautan dan Perikanan, pada Rabu, 19 Juli 2006 di Jakarta. Perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama mengenai “Pengembangan KKMB di Sektor Kelautan dan Perikanan”, yang telah ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Kelautan & Perikanan pada tanggal 30 Januari 2006.

“Pemberdayaan KKMB didasari visi untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan kepada UMKM yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara UMKM dengan bank. Keberhasilan KKMB akan nampak dari beberapa indikator seperti meningkatnya jumlah UMKM yang *bankable* dan memperoleh kredit dari bank serta lancar pengembaliannya, meningkatnya kualitas dan produktifitas pelayanan KKMB dan tumbuhnya kemampuan KKMB untuk membiayai dirinya sendiri (*swadana*)”, demikian Siti Ch. Fadrijah dalam sambutannya.

Selama tahun 2005 sampai Mei 2006, Bank Indonesia telah memberikan pelatihan kepada 1.721 KKMB dan KKMB telah berhasil memfasilitasi pencairan kredit sebesar Rp.169,8 miliar kepada 3.734 UMKM. Selain pelatihan, dalam rangka bantuan teknis, Bank Indonesia menyediakan informasi yang dibutuhkan UMKM seperti menyusun pola pembiayaan (*lending model*) untuk komoditas unggulan yang hingga tahun 2005 telah mencakup 76 komoditi, termasuk 10 komoditi di sektor kelautan dan perikanan. Disamping itu, untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah yang makin pesat beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia selama tahun 2006 akan menerbitkan buku pola pembiayaan dengan sistem syariah untuk 15 komoditi termasuk usaha budi daya pendederan dan pembesaran ikan gurami.

Untuk mengoptimalkan upaya yang dilakukan, peran serta aktif seluruh pihak yang peduli dengan pengembangan UMKM sangat diharapkan untuk menetapkan langkah terbaik dengan tetap menghargai otonomi masing-masing pihak. Selain itu, diperlukan keterpaduan antara *financial assistance* dengan *technical assistance* berupa program pendampingan dari instansi/dinas terkait atau penyediaan infrastruktur secara bersamaan (*full pledge service*).

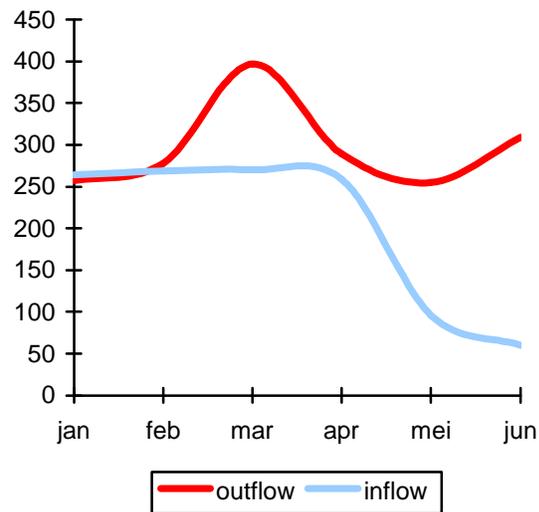
Dikutip dari <http://www.bi.go.id>

3.4 Perkembangan Sistem Pembayaran

3.4.1 Pengedaran Uang Kartal

Perkembangan aliran uang yang masuk (*inflow*) dan keluar (*outflow*) di wilayah kerja Bank Indonesia Batam secara nominal menunjukkan *outflow* yang lebih besar daripada *inflow*. Pada tw.II-2006, *outflow* mencapai Rp. 854,39 miliar, sementara *inflow* mencapai Rp.416,46 miliar, sehingga terjadi *net outflow* sebesar Rp.437,93 miliar. Secara bulanan rata-rata *outflow* Rp.298,02 miliar, sedangkan rata-rata *inflow* Rp.203,42 miliar.

Grafik 3.7 Perkembangan Inflow/Outflow di KBI Batam (Rp. miliar)



Sumber : Bank Indonesia

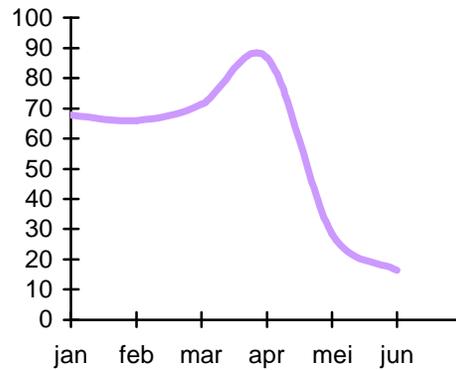
Selama tw.II-2006, uang kertas yang keluar dari KBI Batam sebanyak Rp.853,38 miliar dan uang logam sebanyak Rp.1,03 miliar. Dibandingkan triwulan sebelumnya, baik uang kertas maupun uang logam yang keluar mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 114,69% dan 10,75%.

3.4.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Dalam upaya melaksanakan kebijakan uang bersih (*clean money policy*) Bank Indonesia senantiasa menyediakan uang rupiah dalam kondisi yang layak kepada masyarakat dengan melakukan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) yang dilakukan dengan cara memusnahkan uang yang tidak layak edar dan menggantinya dengan uang yang layak edar. Disamping itu, Bank Indonesia juga memberikan pelayanan kepada perbankan dan masyarakat untuk kegiatan setoran, penarikan dan penukaran untuk pecahan besar ke pecahan kecil serta untuk uang rupiah lusuh.

Pada tw.II-2006, jumlah PTTB pada uang yang tidak layak edar sebesar Rp.131,42 miliar, menurun sebesar 35,87% terhadap triwulan sebelumnya. Penurunan PTTB ini sejalan dengan penurunan jumlah *inflow* ke BI Batam yang menunjukkan bahwa jumlah uang lusuh di masyarakat yang masuk ke Bank Indonesia cenderung berkurang, yang disebabkan penurunan tingkat perputaran uang kartal di masyarakat.

Grafik 3.8 Perkembangan PTTB (Rp miliar)



3.5 Lalu Lintas Pembayaran Giral

3.5.1 Kliring Lokal

Untuk wilayah kerja KBI Batam, terdapat 3 (tiga) wilayah kliring lokal, yaitu: di KBI Batam untuk wilayah Kota Batam, PT. Bank Mandiri untuk wilayah Tanjung Pinang, dan PT. BNI untuk wilayah Tanjung Balai Karimun.

Nilai transaksi melalui sistem kliring lokal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tw.II-2006 mencapai Rp.2,73 triliun atau rata-rata mencapai Rp.683,61 miliar per-bulan. Nilai total kliring tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya baik total warkat kliring maupun secara nominal, begitu pula secara rata-rata.

Tabel 3.13

Perkembangan Kliring Lokal di Wilayah Kerja KBI Batam (Rp. miliar)

Keterangan	2005				2006	
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II
Perputaran Kliring						
- Lembar	144.005	154.879	157.535	150.400	146.241	154.662
- Nominal (miliar Rp)	2.054.496	2.208.473	2.371.965	2.258.818	2.168.735	2.734.433
Rata-rata Harian Perputaran Kliring						
- Lembar	2.400	2.539	2.583	2.593	2.359	2.535
- Nominal (miliar Rp)	34.242	36.204	38.885	38.945	34.980	44.827
Penolakan Cek/BG Kosong						
- Lembar	860	987	981	1.122	860	1.012
- Nominal (miliar Rp)	23.780	22.388	21.049	22.034	29.418	19.924

Sumber : Bank Indonesia

Volume transaksi kliring di wilker BI Batam pada tw.II-2006 rata-rata mencapai 2.535 per-hari, meningkat 7,46% dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2.359 warkat.

Sementara untuk nominal transaksi kliring, terdapat peningkatan sebesar 26,08% dibandingkan triwulan sebelumnya.

3.5.2 Transaksi BI-RTGS

Transaksi masyarakat melalui sarana Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Kantor Bank Indonesia Batam pada tw.II-2006 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya baik nominal maupun volume transaksi. Nominal transaksi RTGS untuk transaksi masuk sebesar Rp.4,025 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 6.053 transaksi, sementara untuk transaksi keluar sebesar Rp.5,515 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 7.385 transaksi.

Sama halnya dengan transaksi melalui kliring lokal, peningkatan transaksi melalui RTGS pada triwulan ini juga mengalami peningkatan.

Tabel 3.14
Perkembangan RTGS di wilker KBI Batam (Rp triliun)

Keterangan	2006		q-t-q	
	Tw.I	Tw.II	Nominal	%
Transaksi Masuk				
Nominal	3,362	4,025	663	19,71
Volume	4.903	6.053	1.150	23,46
Transaksi Keluar				
Nominal	3,845	5,515	1,670	43,43
Volume	5.773	7.385	1.612	27,92

Sumber : Bank Indonesia

3.5.3 Uang Palsu

Jumlah uang rupiah palsu yang dilaporkan ke Bank Indonesia Batam pada tw.II-2006 berjumlah Rp.1.220.000,00 dan mencapai 28 lembar. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan nominal sebesar Rp.840.000,00 meskipun jumlah lembar meningkat sebanyak 3 lembar.

Berdasarkan jenis pecahan, uang kertas Rp.20.000,00 merupakan jenis uang terbanyak dipalsukan yang mencapai 16 lembar atau 57,14% dari total temuan uang palsu. Terkait dengan uang palsu yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia Batam terus melakukan berbagai upaya untuk menekan peredarannya, antara lain dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada berbagai kalangan (perbankan, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum).

Bab 4

Keuangan Daerah Periode Tahun 2006

4.1 KONDISI UMUM

Jumlah anggaran yang ditetapkan oleh suatu Pemerintah Daerah menjadi salah satu faktor pendukung utama terhadap kemajuan dan perkembangan suatu daerah, demikian pula dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 (enam) Kota/Kabupaten, yaitu : Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas :

- a. Anggaran pendapatan, terdiri atas :
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - Bagian dana perimbangan, yang meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dana alokasi khusus, serta bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Provinsi.
- b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2006 terdapat peningkatan target penerimaan sebesar 70,99% yang disebabkan peningkatan target penerimaan pada beberapa pos, antara lain: pos pendapatan asli daerah, dan pos dana perimbangan. Sementara itu untuk pos retribusi daerah, pos lain-lain PAD yang sah, pos Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pos lain-lain pendapatan yang sah terjadi penurunan target penerimaan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Perbandingan Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri
Tahun 2005 dan 2006

NO	URAIAN	RENCANA	RENCANA	PERUBAHAN	RENCANA
		PENERIMAAN 2005 (Rp)	PENERIMAAN 2006 (Rp)	2005 Thd 2006 (%)	PENERIMAAN 2007 (Rp)
1	PAD	178.831.000.000,00	235.536.000.000,00	31,71	274.262.900.000,00
	Pajak Daerah	172.421.000.000,00	229.116.000.000,00	32,88	267.486.300.000,00
	Retribusi Daerah	280.000.000,00	420.000.000,00	-9,53	462.000.000,00
	Lain-lain PAD yg sah	6.310.000.000,00	6.000.000.000,00	-100,00	6.314.600.000,00
2	DANA PERMBNGN	158.132.000.000,00	400.075.000.000,00	153,00	688.815.500.000,00
	Bagi Hasil Pajak	85.032.000.000,00	100.555.000.000,00	18,26	115.600.500.000,00
	Bagi Hasil Bkn Pajak	37.200.000.000,00	121.520.000.000,00	226,67	350.715.000.000,00
	DAU	25.900.000.000,00	178.000.000.000,00	587,26	222.500.000.000,00
	DAK	10.000.000.000,00	0	-100,00	0
3	LAIN2 PENDPTAN YG SAH	34.758.840.000,00	0	-100,00	0
	Dana Penyeimbang	34.758.840.000,00	0	-100,00	0
	JML PENDAPATAN DAERAH	371.721.840.000,00	635.611.000.000,00	70,99	963.078.400.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, jumlah penerimaan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tw.II-2006 sebesar Rp.296,29 atau sebesar 62,44% dari jumlah yang ditargetkan.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Provinsi Kepulauan Riau

(1 = Rp. 1 miliar)

No	Jenis Penerimaan	2005	2006		
		Sem. I	Tw.I	Tw.II	Sem. I
I	PEMBIAYAAN	37.589,37	91.770,24	448,53	92.218,77
II	PENDAPATAN				
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.029,51	18.808,15	23.862,91	42.671,06
1	Pajak Daerah	16.602,37	12.827,94	15.335,24	28.163,18
2	Retribusi Daerah	9.818,01	4.639,40	5.247,78	9.887,18
3	Lain-lain PAD yang sah	2.126,06	1.340,81	3.279,90	4.620,71
4	Laba Perusahaan yang Sah	482,95	-	-	-
B	DANA PERIMBANGAN	105.610,98	45.719,23	115.682,66	161.401,89
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	40.009,4	6.100,06	19.386,93	25.486,99
2	Dana Alokasi Umum	2.686,08	2.028,55	58.994,97	61.023,52
3	Dana Alokasi Khusus	62.915,5	37.300,75	37.300,75	74.601,50
4	Bagi Hasil Pajak Provinsi	-	289,87	-	289,87
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	172.222,86	156.297,62	139.994,10	296.291,72

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah – Provinsi Kepulauan Riau

Target pendapatan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2006 sebesar Rp.635 miliar dan belanja daerah sebesar Rp.914 miliar. Oleh karena itu, terdapat defisit sebesar Rp.278 miliar. Untuk mengatasi defisit tersebut, Pemerintah Daerah akan melakukan pembiayaan melalui beberapa upaya, antara lain :

- a. sisa anggaran tahun 2005 Rp.127.455.716.443,00
- b. Over target pendapatan tahun 2005 Rp.151.358.425.330,00
- c. Over target yang berasal dari :
 - selisih pendapatan APBD P Rp. 17.575.412.499,00
 - over target PAD Rp. 32.852.667.003,00
 - over target dana perimbangan Rp.100.930.345.828,00

4.2 APBD KOTA BATAM

Target APBD Kota Batam tahun 2006 terdiri dari pos pendapatan sebesar Rp.474,50 miliar dan pos pembiayaan sebesar Rp.63,74 miliar. Target APBD Kota Batam tahun 2006 meningkat dibandingkan tahun 2005, dimana pada tahun 2005 pos pendapatan Kota Batam sebesar Rp.356,10 miliar dan pos pembiayaan sebesar Rp.60,05 miliar.

Realisasi penerimaan pendapatan Kota Batam sampai dengan tw.II-2006 mencapai Rp.296,29 miliar atau mencapai 62,44% dari target pendapatan Kota Batam tahun 2006 yang telah ditetapkan. Penerimaan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.42,67 miliar dan Dana Perimbangan sebesar Rp.161,4 miliar.

Penerimaan daerah selama periode Semester I-2006, jika dilihat menurut jenisnya sebagian besar (4,47%) dari jenis dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak dan dana alokasi umum. Ditempat kedua dengan kontribusi sebesar 31,12% berasal dari jenis dana pembiayaan yang terdiri dari sisa anggaran sebelumnya dan pengembalian pokok pinjaman dana bergulir, sedangkan penerimaan dalam bentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD) berada pada posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 14,40% atau sebesar Rp.42,67 miliar.

Secara total, penerimaan Dispenda Kota Batam selama periode Januari-Juni 2006 meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan PAD mengalami peningkatan, yaitu pada periode Januari-Juni 2005 rata-rata perbulan PAD sebesar Rp.4,84 miliar, sedangkan pada periode Januari-Juni 2006 rata-rata perbulan sebesar Rp.7,11 miliar.

4.3 PENERIMAAN KANTOR PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kota Batam meningkat dari Rp.26,95 miliar (tw.I-2006) menjadi Rp.32,26 miliar (tw.II-2006) atau meningkat sebesar 19,70%. Dengan demikian selama Semester I (Januari – Juni 2006) penerimaan PKB dan BBN-KB di Kota Batam sebesar Rp.59,20 miliar, lebih tinggi dibandingkan penerimaan periode yang sama tahun 2005 atau naik sebesar 13,10%.

Dari struktur penerimaan menurut jenisnya selama periode Semester I-2006, sebesar 70,13% dalam bentuk PKB dan 29,87% dalam bentuk BBN-KB, atau dari Rp.15,44 miliar pada periode Semester I-2005 menjadi Rp.17,69 miliar pada periode Semester I-2006 atau naik sebesar 14,53%.

Tabel 4.3
Perkembangan Realisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB
Di Kota Batam (Juta Rp)

Periode	2005			2006		
	PKB	BBN-KB	Jml	PKB	BBN-KB	Jml
I. Tw.I	16.823,27	6.308,54	23.131,81	18.962,54	7.983,65	26.946,19
1. Januari	4.229,82	1.881,70	6.111,52	5.850,35	2.545,76	8.396,11
2. Februari	5.279,26	2.113,37	7.392,63	6.448,63	2.532,15	8.980,78
3. Maret	7.314,19	2.313,47	9.627,66	6.663,56	2.905,74	9.569,30
II. Tw.II	20.080,22	9.133,57	29.137,91	22.553,12	9.702,07	32.255,19
1. April	6.736,47	2.879,79	9.616,26	7.464,52	3.055,47	10.520,00
2. Mei	6.545,87	2.901,39	9.447,26	9.369,07	3.680,76	13.049,83
3. Juni	6.797,88	3.352,39	10.150,27	5.719,53	2.965,84	8.685,37
Semester I	36.903,49	15.442,11	52.345,60	41.515,66	17.685,72	59.201,38

Sumber : Kantor Pendapatan Daerah Provinsi Kepri

4.4 PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA BATAM

Pada tw.I-2006 (Januari-Maret), realisasi penerimaan pajak neto dalam bentuk PPh, PPN, dan PPN-BM serta pajak lainnya berjumlah Rp.210,75 miliar, sedangkan pada tw.II-2006 realisasi penerimaan sebesar Rp.180,79 miliar. Dengan demikian selama periode Januari-Juni 2006, realisasi penerimaan pajak neto telah mencapai Rp.391,54 miliar, lebih rendah dibandingkan periode Semester I-2005 yang tercatat sebesar Rp.600,10 miliar atau turun sebesar 34,75%.

Apabila dilihat dari struktur penerimaan pajak menurut jenisnya selama periode Semester I-2006, sebesar 90,96% dalam bentuk PPh meskipun menunjukkan peningkatan andil jenis pajak ini dibanding pada periode Semester I-2005 yang mencapai 86,59%. Penerimaan pajak dalam bentuk PPN dan PPN-BM kontribusinya juga menurun dari 11,98% (Semester I-2005) menjadi 8,59% (Semester I-2006). Dengan demikian, perlu terus ditindaklanjuti langkah-langkah positif yang telah diterapkan dalam upaya mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak di Kota Batam, dengan lebih mengedepankan transparansi dari objek pajak maupun aparat perpajakan.

Tabel 4.4
Realisasi Penerimaan Pajak Neto melalui KPP Batam
(Miliar Rp)

Periode	2005 *)				2006 *)			
	PPh	PPN & PPn-BM	Lain	Jml	PPh	PPN & PPn-BM	Lain	Jml
I. Triwulan I	264,91	38,13	4,08	307,12	199,24	11,00	0,51	210,75
a. Januari	63,14	14,00	1,14	78,28	49,80	5,47	0,10	55,37
b. Februari	54,65	11,58	,52	67,75	53,72	5,76	0,11	59,60
c. Maret	147,12	12,55	1,42	161,09	95,72	-0,24	0,30	95,78
II. Triwulan II	254,71	33,78	4,49	292,98	156,91	22,64	1,24	180,79
d. April	74,55	11,73	1,45	87,73	53,38	6,86	0,69	60,93
e. Mei	67,69	11,90	1,50	81,09	54,80	7,89	0,41	63,10
f. Juni	112,47	10,15	1,54	124,16	48,73	7,89	0,14	56,76
Semester I	519,62	71,91	8,57	600,10	356,15	33,64	1,75	391,54

Sumber : KPP Batam

Ket : *) Angka Perbaikan

Bab 5

Prospek Perekonomian Daerah

5.1 PROSPEK EKONOMI MAKRO

Berdasarkan perkembangan beberapa indikator ekonomi selama tw.II-2006, kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan mendatang diperkirakan masih mengalami pertumbuhan yang positif dengan laju pertumbuhan meningkat.

Di sisi produksi, pertumbuhan masih didorong oleh sektor utama yaitu sektor industri serta sektor perdagangan, hotel & restoran. Pertumbuhan di sektor industri didukung oleh penerapan sistem *Special Economic Zone* (SEZ) di wilayah Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Peningkatan sektor ini tercermin dari meningkatnya jumlah investor asing yang menanamkan modalnya di Batam sehingga akan mempengaruhi produksi. Disamping itu, percepatan laju pertumbuhan sektor industri akan berpengaruh positif terhadap sektor riil lain, diantaranya adalah : penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan perkapita daerah, dll.

Disamping kedua sektor tersebut, beberapa sektor lain diperkirakan juga akan mengalami pertumbuhan positif. Untuk sektor bangunan/konstruksi diperkirakan mengalami pertumbuhan positif yang didorong oleh meningkatnya pembangunan property dan infrastruktur akibat dari peningkatan permintaan. Demikian pula halnya dengan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang juga diperkirakan mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan meningkatnya kegiatan usaha.

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh peningkatan pada komponen investasi dan ekspor, dimana peningkatan investasi dipengaruhi oleh pembentukan modal tetap bruto karena pembangunan gedung dan infrastruktur, khususnya di daerah perkotaan seperti Batam, Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun.

Untuk triwulan mendatang, beberapa hal pendorong perekonomian daerah terkait dengan kebijakan pemerintah akan turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi makro. Disamping itu, upaya pemerintah daerah dan pusat untuk mempromosikan potensi-potensi yang terdapat di Kepulauan Riau dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Negara-negara tetangga yang sebelumnya belum mengetahui potensi yang terdapat di Kepri akan tertarik untuk berinvestasi di wilayah ini.

5.2 PROSPEK INFLASI

Laju pergerakan harga pada tw.III-2006 diperkirakan akan sedikit meningkat meskipun masih berada dibawah laju inflasi nasional. Hal ini karena dampak kenaikan BBM pada akhir tahun 2005 masih mempengaruhi daya beli masyarakat. Disamping itu, isu kenaikan tarif listrik akan berpengaruh terhadap ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi kedepan.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), responden di wilayah Kota Batam dan Tanjung Pinang memperkirakan laju inflasi triwulan mendatang secara rata-rata mencapai 9% (y-o-y), dimana laju tersebut meningkat dibandingkan prakiraan inflasi triwulan sebelumnya yang mencapai 7,6%.

5.3 PROSPEK PERBANKAN

Sejalan dengan prospek perekonomian daerah yang meningkat, peran sektor keuangan khususnya perbankan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tw.III-2006 diperkirakan juga akan mengalami peningkatan pada indikator-indikator perbankan, baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran kredit.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau cenderung mengalami pertumbuhan penghimpunan dana yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi cukup besar yang terdapat pada sektor perbankan terhadap sisi pembiayaan, dimana dana masyarakat yang terhimpun tersebut akan menjadi modal perbankan untuk penyaluran kredit. Meskipun demikian, pihak perbankan mesti tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dengan meningkatnya kegiatan dunia usaha serta rencana pemerintah untuk membangun beberapa proyek infrastruktur di wilayah Kepri diperkirakan juga akan mendorong peningkatan kredit.

**TABEL 1. PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA 2005 - 2006 (JUTAAN RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2005				2006	
	TRWI	TRWII	TRWIII	TRWIV	TRWI	TRWII
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. PERTANIAN	523,813.54	527,493.85	575,444.60	555,568.45	578,142.99	591,645.21
a. Tanaman Pangan & Hortikultura	32,750.83	27,927.78	28,187.01	19,611.67	34,619.11	34,619.11
b. Perkebunan	22,788.15	38,204.04	49,649.33	34,904.93	35,073.77	36,567.16
c. Peternakan	88,288.54	87,982.77	89,884.15	89,673.05	90,136.94	92,924.82
d. Kehutanan	7,308.13	8,324.88	8,077.57	7,493.95	7,648.92	7,898.51
e. Perikanan	372,677.90	365,054.38	399,646.54	403,884.85	410,664.25	419,635.61
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	865,919.07	962,131.50	1,092,582.76	1,156,387.99	1,181,518.99	1,212,007.33
a. Pertambangan	758,041.28	833,139.03	961,853.08	1,017,061.48	1,040,394.35	1,061,483.96
b. Pertambangan non migas	62,570.15	82,424.52	81,634.05	88,486.58	89,073.33	96,271.45
c. Penggalian	45,307.63	46,567.95	49,095.64	50,839.94	52,051.30	54,251.92
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5,649,754.42	5,906,613.08	6,054,262.36	6,279,602.23	6,438,488.32	6,656,379.13
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-
b. Industri Non migas	5,649,754.42	5,906,613.08	6,054,262.36	6,279,602.23	6,438,488.32	6,656,379.13
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	30,208.07	31,935.93	32,290.14	33,189.26	33,890.98	34,943.56
a. Listrik	24,272.32	24,909.15	25,105.54	25,885.32	26,406.54	27,356.37
b. Air Bersih	5,935.75	7,026.78	7,184.60	7,303.94	7,484.44	7,587.19
5. BANGUNAN	342,521.88	371,673.29	394,801.83	418,751.16	453,158.26	900,828.39
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	800,279.27	847,551.34	882,370.30	889,098.39	893,056.24	900,828.39
a. Perdagangan Besar dan Eceran	699,656.04	737,038.98	766,644.09	769,032.21	770,322.28	773,619.70
b. Hotel	62,613.58	69,368.18	73,676.35	75,634.81	77,132.90	79,995.21
c. Restoran	38,009.66	41,144.17	42,049.86	44,431.37	45,601.06	47,213.48
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	365,587.93	380,556.16	401,163.46	417,671.42	435,870.58	453,107.63
a. Angkutan	330,280.69	340,247.46	357,115.48	371,605.95	388,749.35	405,986.39
b. Komunikasi	35,307.23	40,308.70	44,047.98	46,065.47	47,121.24	47,121.24
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRS	540,075.51	549,899.67	575,161.37	595,083.02	611,498.39	624,643.71
a. Bank	373,170.08	375,580.75	394,352.78	407,418.97	420,145.49	427,284.95
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & JPK	17,857.99	18,573.33	19,321.71	19,557.48	19,876.67	20,169.31
c. Jasa Penunjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Sewa Bangunan	145,245.50	151,782.99	157,380.09	163,768.06	166,953.80	172,478.14
e. Jasa Perusahaan	3,801.93	3,962.60	4,106.79	4,338.52	4,522.43	4,711.31
9. JASA - JASA	213,652.64	226,390.87	237,822.83	248,315.96	254,733.83	264,204.79
PDRB	9,331,812.34	9,804,245.68	10,245,899.66	10,593,667.88	10,880,358.58	11,209,941.06

Sumber : BPS Batam

**TABEL 2. PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
MENURUT LAPANGAN USAHA 2005 - 2006 (JUTAAN RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2005				2006	
	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	TRW II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. PERTANIAN	333,331.80	336,520.88	361,306.57	353,467.25	378,314.54	385,684.79
a. Tanaman Pangan & Hortikultura	23,509.21	20,625.21	20,475.96	13,915.94	23,019.89	22,915.49
b. Perkebunan	15,075.58	21,689.59	26,130.44	19,158.74	19,358.26	20,167.66
c. Peternakan	56,198.66	55,844.75	56,633.71	57,687.59	58,064.17	59,552.94
d. Kehutanan	4,429.06	5,185.53	4,960.32	5,253.01	5,716.29	5,781.47
e. Perikanan	257,628.50	253,801.01	273,582.11	271,367.91	272,155.92	277,267.23
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	513,779.96	514,874.68	530,515.95	523,590.30	524,705.03	532,542.17
a. Pertambangan	450,311.47	446,004.26	457,874.84	447,461.74	447,788.08	451,516.83
b. Pertambangan non migas	33,873.47	38,779.16	41,134.17	43,967.52	44,104.33	47,324.21
c. Penggalian	29,595.02	30,091.26	31,506.94	32,161.05	32,812.62	33,701.13
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4,923,237.99	5,064,164.01	5,161,245.41	5,280,709.94	5,342,551.90	5,455,945.06
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-
b. Industri Non migas	4,923,237.99	5,064,164.01	5,161,245.41	5,280,709.94	5,342,551.90	5,455,945.06
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	16,971.43	17,454.17	17,652.93	18,197.85	18,288.26	18,778.90
a. Listrik	13,985.19	14,456.25	14,637.19	15,146.47	15,202.61	15,651.13
b. Air Bersih	2,986.24	2,997.92	3,015.74	3,051.39	3,085.65	3,127.77
5. BANGUNAN	187,767.28	190,907.00	199,906.19	204,073.75	209,025.45	216,832.84
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	611,923.30	619,780.77	631,136.96	628,386.04	630,612.82	635,410.85
a. Perdagangan Besar dan Eceran	529,084.70	532,659.12	541,581.72	538,321.77	539,529.91	541,607.16
b. Hotel	53,736.49	57,478.32	59,404.63	59,536.81	60,082.47	62,172.60
c. Restoran	29,102.10	29,643.34	30,150.61	30,527.45	31,000.44	31,631.09
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	265,422.85	273,572.82	287,039.59	298,041.42	305,931.92	311,807.20
a. Angkutan	234,315.04	241,672.91	253,811.82	263,291.96	270,710.30	275,467.08
b. Komunikasi	31,107.81	31,899.91	33,227.77	34,749.46	35,221.62	36,340.12
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRS	329,789.12	326,188.13	334,297.46	345,351.12	351,905.08	358,225.02
a. Bank	222,594.37	217,021.56	222,917.33	231,118.32	237,159.82	240,681.13
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & JPK	11,712.35	11,838.68	12,039.12	12,307.18	12,422.04	12,963.23
c. Jasa Penunjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Sewa Bangunan	93,453.45	95,240.52	97,188.45	99,706.88	100,044.59	102,259.37
e. Jasa Perusahaan	2,028.96	2,087.36	2,152.56	2,218.75	2,278.63	2,321.29
9. JASA - JASA	144,507.06	146,278.11	147,375.25	149,507.54	150,675.71	153,661.46
P D R B	7,326,730.78	7,489,740.57	7,670,476.32	7,801,325.21	7,912,010.71	8,068,888.29

Sumber : BPS Batam

TABEL 3. PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jan '05 s.d Mar '06 (Tahun 2002=100)

Kelompok	Januari 06		Februari 06		Maret 06		April 06		Mei 06		Juni 06	
	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.
UMUM	128.40	1.32	128.53	0.10	127.57	-0.75	126.85	-0.56	126.82	-0.02	127.06	0.19
I. BAHAN MAKANAN	129.55	4.49	129.92	0.29	126.00	-3.02	123.08	-2.32	122.24	-0.68	123.27	0.84
a. Padi-padian, umbi-umbian & hasil hasilnya	144.90	6.23	160.56	10.81	157.25	-2.06	150.10	-4.55	150.54	0.29	154.06	2.34
b. Daging dan hasil-hasilnya	110.62	5.60	109.53	-0.99	106.43	-2.83	105.53	-0.85	104.40	-1.07	104.69	0.28
c. Ikan segar	127.38	7.59	130.21	2.22	128.80	-1.08	124.22	-3.56	121.07	-2.54	124.82	3.10
d. Ikan diawetkan	124.02	0.95	126.92	2.34	129.36	1.92	129.23	-0.10	129.22	-0.01	129.46	0.19
e. Telur, susu dan hasil-hasilnya	111.07	2.77	111.80	0.66	110.11	-1.51	108.56	-1.41	109.70	1.05	110.44	0.67
f. Sayuran	172.48	12.48	151.84	-11.97	134.02	-11.74	134.79	0.57	129.77	-3.72	127.07	-2.08
g. Kacang-kacangan	117.18	3.45	117.18	0.00	117.11	-0.06	117.13	0.02	116.70	-0.37	116.79	0.08
h. Buah-buahan	119.25	-2.84	120.38	0.95	115.84	-3.77	114.91	-0.80	114.48	-0.37	118.16	3.21
i. Bumbu-bumbuan	140.16	0.31	133.60	-4.68	129.00	-3.44	121.77	-5.60	124.05	1.86	119.67	-3.52
j. Lemak dan minyak	116.37	-0.86	114.78	-1.37	114.16	-0.54	114.24	0.07	113.76	-0.42	113.63	-0.11
k. Bahan makanan lainnya	124.71	0.00	124.83	0.10	124.83	0.00	124.74	-0.07	125.31	0.46	125.31	0.00
II. MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	127.97	0.53	127.96	0.00	128.49	0.41	128.43	-0.05	128.67	0.19	128.81	0.11
a. Makanan jadi	128.96	0.08	128.97	0.00	129.11	0.11	129.14	0.02	129.47	0.26	129.49	0.02
b. Minuman yang tidak beralkohol	128.30	2.68	128.20	-0.08	126.63	-1.22	126.22	-0.32	126.66	0.35	127.46	0.63
c. Rokok, tembakau dan minuman beralkohol	126.48	0.16	126.48	0.00	128.50	1.60	128.50	0.00	128.50	0.00	128.51	0.01
III. PERUMAHAN	119.86	0.08	119.89	0.03	119.92	0.03	119.96	0.03	120.19	0.19	120.21	0.02
a. Biaya tempat tinggal	111.35	0.00	111.35	0.00	111.36	0.01	111.39	0.03	111.73	0.31	111.73	0.00
b. Bahan bakar, penerangan dan air	148.77	0.00	148.77	0.00	148.77	0.00	148.77	0.00	148.77	0.00	148.77	0.00
c. Perlengkapan rumah tangga	107.50	-0.26	107.57	0.07	107.77	0.19	108.10	0.31	108.45	0.32	108.59	0.13
d. Penyelenggara rumah tangga	108.06	1.03	108.39	0.31	108.48	0.08	108.62	0.13	108.64	0.02	108.74	0.09
IV. SANDANG	111.96	0.31	112.24	0.25	111.86	-0.34	112.84	0.88	113.78	0.83	112.23	1.36
a. Sandang laki-laki dewasa	102.96	0.00	102.96	0.00	102.96	0.00	102.96	0.00	102.96	0.00	103.09	0.13
b. Sandang wanita dewasa	100.67	0.00	100.67	0.00	100.67	0.00	100.68	0.01	100.68	0.00	100.90	0.22
c. Sandang anak-anak	102.98	0.06	103.19	0.20	103.19	0.00	103.23	0.04	103.23	0.00	103.27	0.04
d. Sandang pribadi dan sandang lainnya	169.71	1.40	171.26	0.91	168.69	-1.50	175.30	3.92	181.71	3.66	170.29	-6.28
V. KESEHATAN	107.44	0.29	107.52	0.07	107.74	0.20	107.87	0.12	107.87	0.00	108.22	0.32
a. Jasa kesehatan	111.03	0.00	111.03	0.00	111.03	0.00	111.03	0.00	111.03	0.00	111.03	0.00
b. Obat-obatan	112.18	0.00	112.18	0.00	112.94	0.68	112.95	0.01	112.95	0.00	112.95	0.00
c. Jasa Perawatan Jasmani	111.97	0.00	111.97	0.00	111.97	0.00	111.97	0.00	111.97	0.00	111.97	0.00
d. Perawatan Jasmani dan Kosmetika	104.56	0.51	104.69	0.12	104.91	0.21	105.12	0.20	105.12	0.00	105.73	0.58
VI. PENDIDIKAN, REKREASI & OLAH RAGA	120.90	-0.07	120.90	0.00	120.70	-0.17	120.79	0.07	121.31	0.43	121.14	-0.14
a. Jasa Pendidikan	137.22	0.00	137.22	0.00	137.22	0.00	137.22	0.00	137.22	0.00	137.22	0.00
b. Kursus-kursus/Pelatihan	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00
c. Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	107.18	0.00	107.18	0.00	107.18	0.00	107.18	0.00	107.09	-0.08	107.09	0.00
d. Rekreasi	110.75	-0.21	110.75	0.00	110.15	-0.54	110.42	0.25	111.98	1.41	111.47	-0.46
e. Olahraga	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
VII. TRANSPOR & KOMUNIKASI	157.48	0.02	154.48	0.00	154.60	0.08	154.60	0.00	154.79	0.12	154.78	-0.01
a. Transpor	177.19	0.03	177.19	0.00	177.12	-0.40	177.12	0.00	177.26	0.08	177.26	0.00
b. Komunikasi dan pengiriman	115.92	0.00	115.92	0.00	115.92	0.00	115.92	0.00	115.92	0.00	115.92	0.00
c. Sarana dan penunjang transpor	103.02	0.00	103.02	0.00	103.02	0.00	103.06	0.04	105.07	1.95	105.07	0.00
d. Jasa Keuangan	163.97	0.00	163.97	0.00	170.78	4.15	170.78	0.00	170.78	0.00	170.78	0.00

Sumber : BPS Batam

TABEL 4. PERKEMBANGAN INFLASI KOTA BATAM, PEKANBARU DAN NASIONAL

Kota	Q.II/03	Q.III/03	Q.IV/03	Q I/04	Q II/04	Q III/04	Q IV/04	Q I/05	Q II/05	Q III/05	Q IV/05	Q I/06	Q II/06
1. Batam	1.10	0.75	2.35	0.47	1.10	0.70	1.89	2.65	0.39	1.52	14.79	0.66	-0.39
2. Pekanbaru	2.13	1.61	2.76	1.20	3.45	1.30	2.71	2.75	0.14	2.91	17.1	0.73	0.90
3. Nasional	1.23	1.24	2.50	0.91	2.35	0.49	2.46	3.19	1.05	2.03	17.11	1.98	0.89

Sumber : BPS Batam

**TABEL 5. DATA BANK UMUM
WILAYAH KERJA BANK INDONESIA BATAM**

Dim. Juta Rp.

KETERANGAN	Periode						
	Des-04	Mar-05	Jun-05	Sep-05	Dec-05	Mar-06	Jun-06
TOTAL ASSET	9,427,598	9,316,232	9,715,095	10,213,912	10,666,450	10,559,530	12,173,496
DANA PIHAK III	7,721,045	7,806,495	8,120,960	8,373,778	8,707,149	8,552,495	10,250,252
a. Giro	2,997,398	3,106,069	3,183,277	3,262,739	3,524,558	3,429,726	4,435,878
b. Deposito	1,578,824	1,616,147	1,805,531	2,070,995	2,169,291	2,302,858	3,089,243
c. Tabungan	3,144,823	3,084,279	3,132,152	3,040,044	3,013,300	2,819,911	2,725,131
KREDIT							
a. Jenis Penggunaan	4,397,899	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262
- Modal Kerja	1,654,130	1,803,592	1,848,852	1,962,136	2,137,919	2,081,520	2,199,868
- Investasi	1,247,028	1,359,514	1,433,060	1,712,592	1,637,894	1,511,012	1,596,120
- Konsumsi	1,496,741	1,598,024	1,822,461	2,010,746	2,101,586	2,179,030	2,322,274
b. Golongan Kredit	4,397,899	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262
- KUK	797,388	794,299	787,396	757,976	725,638	733,613	745,690
- Non KUK	3,600,511	3,966,831	4,316,977	4,927,498	5,151,761	5,037,949	5,372,572
b. Jenis Kredit	4,397,899	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262
- UMKM	2,536,067	2,623,049	2,828,126	3,016,067	3,107,943	3,157,413	3,311,625
- Non UMKM	1,861,832	2,138,081	2,276,247	2,669,407	2,769,456	2,614,149	2,806,637
c. Kolektibilitas	4,397,899	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262
- Lancar	3,912,608	4,267,390	4,288,212	4,615,820	4,844,373	4,650,364	4,957,027
- D.P.Khusus	367,920	364,458	605,892	776,895	680,053	789,573	801,847
- Kurang Lancar	26,663	21,268	46,585	63,022	86,674	22,604	43,229
- Diragukan	44,111	54,412	33,562	79,628	23,721	52,004	40,739
- Macet	46,597	53,602	130,122	150,109	242,578	257,017	275,420
RATIO							
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	56.96%	60.99%	62.85%	67.90%	67.50%	67.48%	59.69%
b. Non Performing Loans (NPL)	2.67%	2.72%	4.12%	5.15%	6.01%	5.75%	5.87%
c. Penyaluran KUK	18.13%	16.68%	15.43%	13.33%	12.35%	12.71%	12.19%
b. Penyaluran UMKM	57.67%	55.09%	55.41%	53.05%	52.88%	54.71%	54.13%

Sumber : Bank Indonesia Batam

TABEL 6. DATA BANK UMUM
WILAYAH KEPULAUAN RIAU *)

Dlm. Juta Rp.

KETERANGAN	Periode						
	Des-04	Mar-05	Jun-05	Sep-05	Des-05	Mar-06	Jun-06
TOTAL ASSET	2,303,682	2,238,450	2,113,432	2,191,751	2,478,341	2,398,828	3,042,097
DANA PIHAK III	2,262,698	2,206,829	2,071,113	2,149,477	2,437,201	2,373,852	3,052,762
a. Giro	697,680	735,859	714,414	769,934	935,856	925,238	1,444,613
b. Deposito	392,682	395,319	374,358	411,866	459,923	544,678	989,615
c. Tabungan	1,172,336	1,075,651	982,341	967,677	1,041,422	903,936	618,534
KREDIT							
a. Jenis Penggunaan	634,612	639,497	639,267	697,352	739,121	741,651	815,656
- Modal Kerja	323,299	334,687	285,325	300,031	325,025	306,969	323,429
- Investasi	109,091	120,945	118,910	148,491	149,391	155,244	167,130
- Konsumsi	202,222	183,865	235,032	248,830	264,705	279,438	325,097
b. Golongan Kredit	634,612	639,497	639,267	697,352	739,121	741,651	815,656
- KUK	165,137	165,365	165,373	160,911	165,491	156,478	164,503
- Non KUK	469,475	474,132	473,894	536,441	573,630	585,173	651,153
b. Jenis Kredit	634,612	639,497	639,267	697,352	739,121	741,651	815,656
- UMKM	452,779	457,185	440,462	476,980	514,989	508,797	543,262
- Non UMKM	181,833	182,312	198,805	220,372	224,132	232,854	272,394
c. Kolektibilitas	634,612	639,497	639,267	697,352	739,121	741,651	815,656
- Lancar	594,404	607,656	548,440	586,079	613,762	595,463	675,715
- D.P Khusus	29,529	20,119	78,174	34,149	37,822	53,146	26,564
- Kurang Lancar	5,917	1,646	1,712	11,706	413	2,941	13,959
- Diragukan	1,280	4,408	1,334	54,760	11,768	10,139	14,464
- Macet	3,482	5,668	9,607	10,658	75,356	79,962	84,954
RATIO							
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	28.05%	28.98%	30.87%	32.44%	30.33%	31.24%	26.72%
b. Non Performing Loan (NPLs)	1.68%	1.83%	1.98%	11.06%	11.84%	12.55%	13.90%
c. Penyaluran KUK	26.02%	25.86%	25.87%	23.07%	22.39%	21.10%	20.17%
d. Penyaluran UMKM	71.35%	71.49%	68.90%	68.40%	69.68%	68.60%	66.60%

Sumber : Bank Indonesia Batam

*) meliputi Tj. Pinang, Tj. Balai Karimun, Natuna

**TABEL 7. DATA BANK UMUM
WILAYAH KOTA BATAM**

dlm.juta Rp

KETERANGAN	Periode						
	Des.2004	Mar.2005	Jun.2005	Sep.2005	Des-05	Mar.2006	Jun 2006
TOTAL ASSET	7,123,916	7,077,782	7,601,663	#####	8,188,109	8,160,702	9,131,399
DANA PIHAK III	5,458,347	5,599,666	6,049,847	#####	6,269,948	6,178,643	7,197,490
a. Giro	2,299,718	2,370,210	2,468,863	2,492,805	2,588,702	2,504,488	2,991,265
b. Deposito	1,186,142	1,220,828	1,431,173	1,659,129	1,709,368	1,758,180	2,099,628
c. Tabungan	1,972,487	2,008,628	2,149,811	2,072,367	1,971,878	1,915,975	2,106,597
KREDIT							
a. Jenis Penggunaan	3,763,287	4,121,633	4,465,106	#####	5,138,278	5,029,911	5,302,606
- Modal Kerja	1,330,831	1,468,905	1,563,527	1,662,105	1,812,894	1,774,551	1,876,439
- Investasi	1,137,937	1,238,569	1,314,150	1,564,101	1,488,503	1,355,768	1,428,990
- Konsumsi	1,294,519	1,414,159	1,587,429	1,761,916	1,836,881	1,899,592	1,997,177
b. Golongan Kredit	3,763,287	4,121,633	4,465,106	#####	5,138,278	5,029,911	5,302,606
- KUK	632,251	628,934	622,023	597,065	560,147	577,135	581,187
- Non KUK	3,131,036	3,492,699	3,843,083	4,391,057	4,578,131	4,452,776	4,721,419
b. Jenis Kredit	3,763,287	4,121,633	4,465,106	#####	5,138,278	5,029,911	5,302,606
- UMKM	2,083,288	2,165,864	2,387,664	2,539,087	2,592,954	2,648,616	2,768,363
- Non UMKM	1,679,999	1,955,769	2,077,442	2,449,035	2,545,324	2,381,295	2,534,243
c. Kolektibilitas	3,763,287	4,121,633	4,465,106	#####	5,138,278	5,029,911	5,302,606
- Lancar	3,318,204	3,659,734	3,739,772	4,029,741	4,230,611	4,054,901	4,281,312
- D.P. Khusus	338,391	344,339	527,718	742,746	642,231	736,427	775,283
- Kurang Lancar	20,746	19,622	44,873	51,316	86,261	19,663	29,270
- Diragukan	42,831	50,004	32,228	24,868	11,953	41,865	26,275
- Macet	43,115	47,934	120,515	139,451	167,222	177,055	190,466
RATIO							
a. Loan to Dept Ratio (LDR)	68.95%	73.60%	73.81%	80.14%	81.95%	81.41%	73.67%
b. Non Performing Loan (NPL)	2.84%	2.85%	4.43%	4.32%	5.17%	4.74%	4.64%
c. Penyaluran KUK	16.80%	15.26%	13.93%	11.97%	10.90%	11.47%	10.96%
d. Penyaluran UMKM	55.36%	52.55%	53.47%	50.90%	50.46%	52.66%	52.21%

Sumber : Bank Indonesia Batam
Kepri (Tj.Pinang, Tj.Uban, Karimun dan Natuna)

**TABEL 8. DATA PENGALIRAN KAS MASUK / KELUAR
DAN KEGIATAN PTTB KBI BATAM**

No	Nama Bulan	Pengaliran Masuk (Jutaan Rp)	Pengaliran Keluar (Jutaan Rp)	Pemberian Tanda Tidak Berharga (Jutaan Rp)
1	Tahun 2000	462,953.66	2,635,234.81	398,055.62
2	Tahun 2001	629,831.60	2,987,016.25	239,678.80
3	Tahun 2002	1,033,638.93	2,549,992.51	452,865.93
4	Tahun 2003	1,495,116.25	2,484,657.11	788,860.84
5	Trw. I 2004	482,275.13	581,277.17	260,294.19
	April 2004	152,857.99	288,966.46	111,347.04
	Mei 2004	137,012.24	242,827.66	78,855.53
	Juni 2004	121,594.16	359,354.24	121,919.03
	Trw. II 2004	411,464.39	891,148.36	312,121.60
	Juli 2004	180,275.04	259,625.84	169,516.95
	Agustus 2004	160,469.24	277,640.31	152,555.05
	September	142,558.76	299,878.74	91,383.82
	Trw. III 2004	483,303.04	837,144.89	413,455.82
	Oktober 2004	134,354.00	387,480.00	84,342.00
	Nopember 2004	207,334.00	548,980.00	55,606.00
	Desember 2004	198,076.19	403,276.86	168,836.92
	Trw. IV 2004	539,764.19	1,339,736.86	308,784.92
5	Tahun 2004	1,916,806.75	3,649,307.28	1,294,656.53
	Januari 2005	205,005.66	250,477.47	134,589.81
	Februari 2005	210,216.68	355,120.71	132,907.53
	Maret 2005	225,008.47	321,391.88	141,725.89
	Trw. I 2005	640,230.81	926,990.06	409,223.23
	April 2005	184,344.20	350,837.86	96,965.36
	Mei 2005	193,099.56	296,952.62	80,157.14
	Juni 2005	167,293.98	351,735.51	75,162.38
	Trw. II 2005	544,737.73	999,525.99	252,284.87
	Juli 2005	187,939.07	315,171.45	68,621.75
	Agustus 2005	151,851.55	311,778.20	34,082.81
	Sept 2005	159,589.62	386,899.07	30,538.20
	Trw. III 2005	499,380.25	1,013,848.73	133,242.75
6	Januari 2006	264,207.72	257,567.63	67,711.87
	Februari 2006	269,475.86	278,910.89	65,945.72
	Maret 2006	270,355.37	397,274.49	71,261.43
	Trw. I 2006	804,038.95	933,753.01	204,919.02
7	April 2006	259,239.21	289,319.31	86,798.58
	Mei 2006	96,796.99	255,199.80	28,321.03
	Juni 2006	60,424.38	309,874.21	16,302.79
	Trw. II 2006	416,460.58	854,393.15	131,422.41

Sumber : Bank Indonesia Batam

TABEL 9. PERPUTARAN KLIRING BATAM, TANJUNG PINANG DAN TANJUNG BALAI KARIMUN

JENIS	Trw.IV/2004		Trw.I/2005		Trw.II/2005		Trw.III/2005		Trw.I/2006		Trw.II/2006	
	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari
A. WARKAT KLIRING												
1. WARKAT (Lbr)	145,176	2,304	144,005	2,400	154,879	2,539	157,535	2,583	146,241	2,359	154,662	2,535
2. NOMINAL (Jt.Rp)	2,151,372	34,149	2,054,496	34,242	2,208,473	36,204	2,371,965	38,885	2,168,735	34,980	2,734,433	44,827
B. TOLAKAN KLIRING												
1. CEK KOSONG												
- Lembar	231	4	360	6	369	6	321	5	323	5	327	5
- Nominal (Jt.Rp)	8,940	142	11,296	188	8,456	139	7,845	129	18,482	298	6,654	109
2. BG. KOSONG												
- Lembar	500	8	500	8	618	10	660	11	537	9	685	11
- Nominal (Jt.Rp)	10,658	169	12,504	208	13,932	228	13,204	216	10,936	176	13,270	218
3. ALASAN LAIN												
- Lembar	367	6	570	10	637	10	653	11	528	9	491	8
- Nominal (Jt.Rp)	5,121	81	8,135	136	11,148	183	11,196	184	9,567	154	7,802	128
4. TOTAL TOLAKAN												
- Lembar	1,098	17	1,430	24	1,624	27	1,634	27	1,388	22	1,503	25
- Nominal (Jt.Rp)	24,719	392	31,914	532	33,536	550	32,245	529	38,985	629	27,725	455

Sumber : Bank Indonesia Batam